



# TBNews

TRIBRATA **AKTUAL & FAKTUAL**



## MOMENTUM AKSELERASI **TRANSFORMASI POLRI**



TRIBRATAnews • Edisi IX 2025

M E M B U K A R U A N G T R A N S P A R A N S I P U B L I K



**80** Bersatu Berdaulat  
Rakyat Sejahtera  
Indonesia Maju



# **KAPOLRI PAPARKAN INOVASI POLRI DUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN NASIONAL**

**DIVISI HUMAS POLRI**



Pelindung  
**KAPOLRI, WAKAPOLRI**

Penasehat  
**KADIVHUMAS POLRI**

Ketua Pengarah  
**KARO PENMAS, KARO PID, KARO MULTIMEDIA,  
PENATA KEHUMASAN POLRI UTAMA**

Staf Ahli  
**PARA KABAG DIVHUMAS POLRI**

Pemimpin Redaksi  
**KOMBES POL. BAMBANG TJAHJO BAWONO, S.I.K.,  
S.H., M.HUM., M.SI.**

Staf Redaksi  
**KOMPOL RUDI HARTONO, S.Kom., S.I.K.,  
M.Kom., M.I.K.  
KOMPOL ANGGA HARYA KUSUMA, S.I.K.  
PEMBINA AGUSTIN EKAWATI, S.E.  
IPTU NIFRINAS YULISTIN RIZKY, S.I.Kom.  
PENDA I HARYATI, S.E.  
PENDA I FITRI MARIA SIMANJUNTAK, S.Kom.  
IPDA I DEWA GEDE YUDHA PERWIRA ADHI  
PRADNYANA, S.Kom.  
BRIGADIR AMANDA SILFIA, S.H.  
BRIPDA ALDI RASYID  
BRIPDA IRSYAD KOVA ANUGRAH SIREGAR  
BRIPDA CINTA AMELIA PUTRI AHMAD**

Art Director  
**AGUNG SUPRIYANTO WIDADI, S.Ds.**

Fotografer  
**BAG PRODDOK  
DIVHUMAS POLRI**

Penerbit  
**BAG PENSAT  
DIVHUMAS POLRI**

Kontributor  
**SATKER MABES/SATWIL POLDA**

Percetakan  
**PT Arfi Dua Satu**

Alamat Redaksi  
**Bag Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri  
Jalan Trunojoyo No. 3  
Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7218141, 7218770  
Faks. (021) 7260208, 7218141**

# E D I T O R I A L

## Percepatan Transformasi

Seperempat abad setelah pemisahan dari ABRI, Kepolisian Republik Indonesia kembali dihadapkan pada momen penting dalam perjalanan reformasinya. Gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025 menjadi pengingat keras: publik tak hanya menuntut perubahan struktural, tetapi juga menagih perbaikan kultural menuntut polisi yang berintegritas, terbuka terhadap evaluasi, dan berani memperbaiki diri.

Reformasi Polri bukan proses singkat. Sejak 1999, langkah demi langkah telah ditempuh: pemisahan dari militer, penegasan posisi sebagai institusi sipil melalui UU No. 2 Tahun 2002, hingga penyusunan Grand Strategy Polri 2005–2025. Tiga tahap besar—*trust building*, *partnership building*, dan *strive for excellence* menjadi peta jalan panjang menuju kepolisian modern yang profesional dan humanis. Namun, perubahan struktural tidak selalu mampu menghapus kultur lama. Di sinilah tantangan baru reformasi kini bermuara.

Langkah cepat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Akselerasi Transformasi Polri menunjukkan kesadaran untuk tidak membiarkan momentum publik berlalu begitu saja. Tim yang dipimpin Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana itu memfokuskan kerja pada empat pilar utama: organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan. Melalui tujuh program *Quick Wins* mulai dari penertiban gaya hidup hedon, optimalisasi pengawasan Propam, hingga peningkatan layanan darurat 110 Polri mencoba mengembalikan inti reformasi: kepercayaan publik.

Langkah-langkah ini bukan sekadar administratif. Ia menandai pergeseran paradigma dari reaksi menuju refleksi; dari reformasi struktural menuju restorasi nilai. Kritik dan dialog publik yang kini terbuka direspons bukan dengan defensif, melainkan dengan evaluasi dan perbaikan.

Kini, arah reformasi Polri bukan hanya tentang membenahi institusi, tetapi memulihkan kepercayaan—dan itu hanya bisa dicapai jika setiap perubahan dijalankan dengan kesadaran moral. Seperti yang pernah diingatkan para pendahulu, kekuatan Polri sejati bukan pada kewenangannya, melainkan pada kepercayaan rakyat yang dijaganya.

Momentum reformasi 2025 adalah peluang. Jika dijaga dengan ketulusan dan konsistensi, ia bisa menjadi babak baru perjalanan Polri menuju institusi yang semakin profesional, transparan, dan berkarakter: pelindung dan pengayom yang bekerja dengan hati, bukan semata kewenangan. [\*]

**Redaksi Majalah Tribra News**

menerima kiriman naskah atau tulisan tentang Kepolisian atau ilmu pengetahuan umum maupun artikel lainnya.

E-mail: pensat.divhumas@gmail.com



## 08 laporan **UTAMA**

### Terbuka Terhadap Evaluasi, Wujud Nyata Transformasi Polri

Dua puluh lima tahun setelah berpisah dari ABRI, Polri harus menegaskan kembali jati dirinya: sebagai institusi sipil yang menjadikan evaluasi sebagai jalan menuju perbaikan.

## 22 **UNGKAP KASUS**

- MEMBONGKAR SINDIKAT PEMBOBOL REKENING DORMAN DI BALIK PEMBUNUHAN KACAB BRI



PERISTIWA MINGGU PALMA, KETIKA BRIMOB DIUJI DI BOBONARO



Foto Cover  
Dialog dengan petani  
Sumber: Istimewa

## 32 **KABAR JAJARAN**

- MOTOGP MANDALIKA 2025: POLRI HADIRKAN KEAMANAN KELAS DUNIA

## 42 **INOVASI**

- OJOL KAMTIBMAS: SINERGI BARU POLRI DAN WARGA MENJAGA JAKARTA

## 50 **BUNGA RAMPAI**

- SPPG POLRI JADI MODEL NASIONAL PENGELOLAAN MAKAN BERGIZI GRATIS

## 66 **INSPIRATIF**

- POLISI PELESTARI TRADISI ANDONG WISATA PURWODADI

## 78 **BUAH BIBIR**

- DITILANG ATAU DICERAMAHIN, AKSI UNIK BRIPDA ANANDA RAFI



80

Bersatu Berdaulat  
Rakyat Sejahtera  
Indonesia Maju

KEPALA DIVISI HUMAS POLRI  
MENGUCAPKAN

*Dirgahayu*

# AKADEMI KEPOLISIAN

*Ke-60*

SEMOGA TERUS MELAHIRKAN PERWIRA POLRI  
YANG UNGGUL, BERINTEGRITAS, DAN BERJIWA  
BHAYANGKARA SEJATI.



Kepala Divisi Humas Polri  
Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

**K**apolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV Polri di Desa Bantar Panjang, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (8/10/2025).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait percepatan swasembada pangan nasional.

“Polri terus berupaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan dukungan penuh dari berbagai kementerian, lembaga, instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, serta seluruh elemen masyarakat,” kata Kapolri.

Menurut Kapolri, total potensi lahan dari program ketahanan pangan Polri saat ini telah mencapai 1,19 juta hektare. Dari jumlah tersebut, 554.105 hektare telah ditanami jagung, terdiri atas 484.771 hektare lahan binaan Polri dan 69.334 hektare lahan baku sawah.



Penanaman jagung sepanjang Januari hingga September 2025 menghasilkan produksi mencapai 2,83 juta ton. Upaya ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung program nasional di bidang pertanian dan ketahanan pangan. [\*]

**K**apolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin upacara kenaikan pangkat 27 perwira tinggi (Pati) Polri yang digelar di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/10/2025) malam. Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri pejabat utama Mabes Polri dan Bhayangkari.

Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi, integritas, dan pengabdian para perwira tinggi terhadap institusi dan negara. “Kenaikan pangkat ini bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Kapolri.

Sebanyak empat perwira tinggi naik pangkat dari Inspektur Jenderal menjadi Komisaris Jenderal, delapan perwira dari Brigadir Jenderal menjadi Inspektur Jenderal, dan lima belas perwira dari Komisaris Besar menjadi Brigadir Jenderal.



Kenaikan pangkat ini diharapkan memperkuat soliditas dan kapasitas organisasi Polri dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks, baik di dalam struktur Polri maupun pada lembaga pemerintahan lainnya. [\*]



**K**apolda Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui program swasembada jagung. Hal itu disampaikannya saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal III tahun 2025 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titeik Soeharto), Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang bergabung secara daring, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan.

Kapolda menyampaikan bahwa kehadiran para pejabat pusat dan daerah menjadi bukti sinergi lintas sektor dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. "Panen raya ini merupakan langkah strategis Polri bersama pemerintah untuk mempercepat terwujudnya program swasembada jagung nasional," ujar Kapolda.

Pemerintah menargetkan penanaman jagung di atas lahan seluas satu juta hektare pada tahun 2025. Hingga September, lebih dari 819 ribu hektare lahan telah tersedia, dengan 483 ribu hektare di antaranya sudah ditanami jagung. [\*]



**K**apolda Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) serta Komandan Korps Brimob (Dankor Brimob) Polri di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).

Mutasi dan sertijab di lingkungan Polri bukan hanya merupakan bentuk regenerasi kepemimpinan, tetapi juga wujud penghormatan terhadap perwira tinggi yang telah menuntaskan masa pengabdian. Kenaikan dan pergeseran jabatan diharapkan dapat memperkuat soliditas organisasi serta menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas-tugas strategis Polri.

Dengan sertijab ini, Irjen Pol. Yuda Gustawan resmi menjabat sebagai Kabaintelkam Polri menggantikan Komjen Pol. Akhmad Wiyagus yang memasuki masa purna tugas. Sementara itu, jabatan Dankor Brimob kini diemban oleh Irjen Pol. Ramdani Hidayat menggantikan Komjen Pol. Imam Widodo.

Pejabat baru diharapkan mampu menghadirkan strategi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika tantangan keamanan yang semakin kompleks, mulai dari kejahatan transnasional hingga potensi ancaman terhadap keamanan dalam negeri. [\*]



■ Evakuasi korban bencana alam



## **MOMENTUM AKSELERASI TRANSFORMASI POLRI**

**S**eperempat abad lebih tahun setelah pemisahan dari ABRI, Polri kembali diingatkan untuk menengok jati dirinya: aparat sipil penjaga nurani bangsa. Gelombang demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2025 menjadi titik balik: publik menggugat kembali arah reformasi Polri.

Akar persoalan itu sesungguhnya telah berakar dalam sejarah panjang reformasi. Reformasi 1998 memicu proses besar: pemisahan formal Polri dari ABRI, Keputusan Presiden, dan akhirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan peran kepolisian sebagai institusi sipil.

Namun perubahan struktural belum otomatis begitu saja menghapus kultur lama dan itu menjadi pekerjaan rumah yang kini menjadi fokus utama wacana reformasi 2025.

## ***Terbuka Terhadap Evaluasi, Wujud Nyata Transformasi Polri***

*Dua puluh lima tahun setelah berpisah dari ABRI, Polri harus menegaskan kembali jati dirinya: sebagai institusi sipil yang menjadikan evaluasi sebagai jalan menuju perbaikan.*





**L**angit Jakarta belum benar-benar terang ketika gelombang massa mulai memenuhi jalanan ibu kota pada penghujung Agustus 2025. Dari kampus, pabrik, hingga simpul-simpul perkotaan, demonstrasi serentak menggema di berbagai daerah.

Semula, tuntutan mereka berkisar pada isu kesejahteraan dan kebijakan tunjangan anggota DPR. Namun, dinamika berubah drastis ketika seorang pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di tengah keriuhan. Peristiwa itu memantik kemarahan publik, dan seketika arah emosi massa beralih bukan lagi pada isu ekonomi, tapi pada Polri.

Sejumlah tokoh publik yang aktif bersuara di media sosial kemudian menginisiasi sebuah pernyataan terbuka yang dikenal sebagai "Tuntutan 17+8". Di antara butir-butirnya, terdapat satu poin yang secara spesifik menyerukan reformasi menyeluruh terhadap institusi kepolisian.

Tak menampik gelombang kritik, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan pernyataan tegas yang mencerminkan sikap terbuka Korps Bhayangkara.



# LAPORAN UTAMA



“Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern. Salah satu cirinya adalah bersedia menerima kritik. Polri tidak antikritik,” kata Brigjen Trunoyudo di Mabes TNI, Cilangkap, (5/9/2025).

Sikap terbuka terhadap evaluasi ini menjadi titik awal langkah besar. Dua minggu setelah demonstrasi besar itu, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Tim Reformasi Kepolisian, tim independen yang bertugas mengkaji kembali kedudukan, tugas, dan kewenangan Polri secara menyeluruh.

Merespons langkah Presiden, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan Polri untuk mendukung penuh setiap kebijakan hasil kajian tim tersebut.

“Kita terus melakukan perbaikan. Justru kita ingin mendapat masukan dari masyarakat. Dari aspek kultural pun sudah dilakukan upaya. Namun, tentu kami terus membuka ruang evaluasi, karena sistem punishment dan reward juga sudah berjalan,” kata Kapolri di Istana Negara, (17/9/2025).

*“Kita terus melakukan perbaikan. Justru kita ingin mendapat masukan dari masyarakat. Dari aspek kultural pun sudah dilakukan upaya. Namun, tentu kami terus membuka ruang evaluasi, karena sistem punishment dan reward juga sudah berjalan,”*





Tentu saja, pernyataan itu mempertegas arah perubahan yang sedang dijalankan Polri: reformasi bukan reaksi sesaat, tetapi kelanjutan dari proses transformasi yang telah berlangsung sejak dua dekade terakhir.

#### Akselerasi

Untuk memastikan pembenahan berjalan cepat dan menyeluruh, Jenderal Sigit mengambil langkah proaktif dengan membentuk Tim Akselerasi Transformasi Polri melalui Surat Perintah (Sprin) Nomor: Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025, tertanggal 17 September 2025.

- Tim ini diberi mandat merancang kebijakan dan langkah strategis untuk mempercepat pembenahan Korps Bhayangkara.

- Cakupannya terbilang luas mencakup transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Semua diarahkan sesuai visi Grand Strategy Polri 2025–2045, sebuah cetak biru pembaruan menuju kepolisian berkelas dunia.

- “Perubahan ini tidak hanya menyentuh aspek fisik atau struktur birokrasi, tetapi juga nilai moral, kemanusiaan, keterbukaan, serta peningkatan kualitas pelayanan





publik,” kata Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Kepala Lemdiklat Polri yang ditunjuk menakhodai tim tersebut (23/9/2025).

Menurut Chryshnanda, transformasi ini adalah bentuk keberanian Polri untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki kesalahan, dan beradaptasi dengan tantangan zaman. “Kami ingin memulihkan kepercayaan publik dengan bukti, bukan sekadar wacana,” tambahnya.

### Apresiasi Istana

Langkah cepat yang diambil Polri mendapat sambutan positif dari pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pembentukan Tim Reformasi Kepolisian oleh Presiden dan Tim Akselerasi oleh Kapolri sebagai dua inisiatif yang saling melengkapi.

“Perlu kita apresiasi langkah Polri yang membentuk tim internal untuk mempercepat proses pembenahan. Ini menunjukkan kesungguhan dalam menata diri,” ujarnya di Senayan (23/9/2025).

*“Perlu kita apresiasi langkah Polri yang membentuk tim internal untuk mempercepat proses pembenahan. Ini menunjukkan kesungguhan dalam menata diri,”*



Hanya sehari berselang, Kapolri memimpin langsung rapat perdana Tim Akselerasi Transformasi di ruang Pusedalsis Stamaops Polri, Jakarta Selatan. Rapat itu menghadirkan beragam tokoh: purnawirawan Polri, akademisi, pengamat keamanan, pakar manajemen publik, hingga aktivis HAM.

Beberapa di antaranya adalah Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi, Irjen Pol (Purn) Aryanto Sutadi, Hermawan Sulisty, Rhenald Kasali, Ninik Rahayu, Poengky Indarti,

Hendardi, dan Adrianus Meliala. Nama-nama itu menandakan satu hal: Polri tidak berjalan sendiri dalam perubahan ini.

“Kami mengundang berbagai kalangan agar proses transformasi ini tidak bersifat internal semata, tapi menjadi milik seluruh masyarakat,” ungkap Jenderal Sigit.

Tak berhenti di ruang rapat, Polri juga membuka ruang dialog publik bertajuk “Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban” di kampus PTIK, Jakarta (29/9/2025).

Diskusi itu berlangsung lebih dari lima jam, menghadirkan narasumber seperti Franz Magnis Suseno, Rocky Gerung, Usman Hamid (Amnesty International), Choriul Anam (Kompolnas), dan Dimas Bagus (KontraS).

Dalam forum itu, beragam kritik, saran, dan refleksi disampaikan secara terbuka.

“Kami berterima kasih atas semua masukan. Diskusi ini tidak berhenti di sini. Kami akan terus membuka ruang dialog lain, formal maupun informal,” ujar Kapolri menutup forum tersebut.

Ia menegaskan, Polri berkomitmen menjalankan transformasi yang berkelanjutan dari reformasi struktural menuju restorasi kultural.

### Menatap Ke Depan

Langkah Polri dalam membuka ruang evaluasi publik dan membentuk Tim Akselerasi Transformasi menandai fase baru perjalanan reformasi kepolisian di Indonesia. Jika 25 tahun lalu reformasi dimulai dengan pemisahan dari ABRI, kini reformasi memasuki tahap pemulihan nilai.

Reformasi bukan lagi sekadar membenahan struktur, tetapi tentang menghidupkan kembali semangat Tribrata dan Catur Prasetya di dalam diri setiap anggota Polri. Sebuah langkah yang menuntut keberanian moral dan kerendahan hati untuk mendengar, belajar, dan berubah.

“Transformasi bukan sekadar mengubah bentuk organisasi,” tutur Komjen Chryshnanda, “tetapi mengubah cara pandang terhadap manusia baik yang dilayani maupun yang bertugas melayani.”

Dan di sanalah, inti dari reformasi yang sejati: kesediaan untuk terbuka terhadap evaluasi, karena cinta kepada perubahan itu sendiri. [\*]





# Jejak Reformasi Polri: Dari Pemisahan hingga Restorasi Nilai



*Perjalanan Korps Bhayangkara menuju lembaga sipil modern  
dan upaya untuk kembali meneguhkan kembali roh Tribrata dan Catur Prasetya.*



Pagi itu, 1 April 1999, Markas Besar ABRI di Cilangkap menjadi saksi peristiwa bersejarah perjalanan Korps Bhayangkara. Dalam upacara yang berlangsung sederhana namun penuh makna, dua institusi besar bangsa TNI dan Polri secara resmi akhirnya menempuh jalan terpisah.

Dalam upacara bersejarah itu, Letnan Jenderal Sugiyono, Kepala Staf Umum ABRI, menyerahkan panji-panji Tribrata Polri kepada

Letnan Jenderal Fahrul Rozi, Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Dari tangan Fahrul Rozi, panji tersebut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Roesmanhadi. Serah terima itu menjadi simbol berakhirnya masa kepolisian berada di bawah struktur militer.

Langkah administratif di Cilangkap itu bukan sekadar

seremonial belaka. Pada hari yang sama, Presiden BJ Habibie menandatangani Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-langkah Kebijakan dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari ABRI.

Ingpres ini menjadi dasar hukum awal pemisahan, menegaskan bahwa fungsi keamanan dalam negeri bukan lagi bagian dari pertahanan negara, melainkan urusan sipil yang dijalankan oleh kepolisian.

Beberapa bulan kemudian, 1 Juli 1999, Polri menggelar upacara di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara. Panglima ABRI Jenderal Wiranto hadir sebagai inspektur upacara.

Dalam amanatnya, Wiranto menyebut pemisahan ini sebagai "langkah strategis untuk





# LAPORAN UTAMA

memperkuat sistem hukum nasional dan mengembalikan keseimbangan fungsi pertahanan dan keamanan.”

### Jalan Reformasi

Sejak hari itu, Polri menapaki jalan reformasi panjang yang tidak hanya mengubah struktur, tapi juga menantang untuk membangun kembali budaya, nilai, dan cara pandang terhadap kekuasaan.

Dalam catatan Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia (2006:471), pada hari itu papan nama di Markas Besar Polri diubah, dari semula bertuliskan

“Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia” menjadi “Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Ketika Departemen Pertahanan Keamanan berubah menjadi hanya Departemen Pertahanan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, maka papan nama itu pun berubah lagi. Merujuk pada laporan Tempo tanggal 28 Desember 1998, Polri berada di bawah Departemen Pertahanan hanya dari 1 April 1999 hingga 31 Desember 1999.

Perubahan sederhana itu menandai penegasan identitas baru Polri: bukan lagi bagian dari angkatan bersenjata, tetapi lembaga sipil yang mulai menata kemandiriannya di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Tentu saja, akar persoalan harus dibaca dalam kerangka sejarah. Reformasi 1998 memicu proses panjang: pemisahan formal Polri dari ABRI, Keppres dan akhirnya UU No. 2/2002 yang menegaskan peran kepolisian sebagai institusi sipil.

Sejak saat itulah, Polri menapaki jalan reformasi panjang yang tidak hanya mengubah struktur, tapi juga menantang untuk membangun kembali budaya, nilai, dan cara pandang terhadap kekuasaan.

Gerakan Reformasi 1998 membuka lembar baru tata-kepolisian Indonesia. Proses pemisahan Polri dari ABRI yang dimulai pasca-1998 diformalkan lewat serangkaian kebijakan termasuk upacara serah terima panji pada 1 April 1999, Keppres yang menegaskan kedudukan Polri, hingga UU No. 2 Tahun 2002 yang menata fungsi, peran, dan kedudukan institusi.

Reformasi bukan hanya soal struktur: keluarnya Buku Biru dan Renstra jangka panjang sebagai upaya meredefinisi identitas polisi sebagai institusi sipil menekankan profesionalisme, pelayanan publik, dan penghormatan HAM.

Tahun 2005, Polri menyusun Grand Strategy 2005–2025 yang membagi tiga tahap besar reformasi yakni Trust Building (2005–2010) untuk membangun kepercayaan publik. Partnership Building (2011–2015) yang berfokus pada upaya memperkuat kemitraan masyarakat dan Strive for Excellence (2016–2025) berupa pelayanan publik yang unggul dan modern.



# Pemisahan POLRI dari ABRI

Upacara pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta, 1 April 1999.

Penyerahan panji Polri dari Kasum ABRI, Letjen TNI Sugiyono, kepada Sekjen Departemen Hankam, Letjen TNI Fahrul Rozi. Kemudian panji tersebut diserahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi.



082116317799 museumpolri www.museumpolri.org inp.museum@gmail.com

Komjen Pol Adang Daradjatun yang kala itu menjabat Wakapolri menjelaskan bahwa pada dasarnya doktrin polisi dalam Tribarata dan Catur Prasetya, yang dibuat tahun 1946, paradigmanya sudah berubah sejak tahun 1999.

“Bandingkan isi Tribarata dan Catur Prasetya tahun 1946 dan sejak tahun 1999. Dari abdi negara menjadi abdi masyarakat dan abdi hukum. Sudah jelas mengalami perubahan paradigma bukan?” kata mantan Ketua Tim Reformasi Polri itu.

Bagi Adang, inti reformasi justru ada pada proses menafsir ulang nilai-nilai itu dari sekadar doktrin menjadi spirit hidup yang menuntun perilaku. Pemaknaan ulang ini, kata Adang, menjadi prasyarat agar Polri benar-benar kembali pada jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sekadar alat negara.

Namun dua dekade setelah pemisahan dari ABRI, tantangan baru muncul. Di tengah keterbukaan informasi dan meningkatnya partisipasi publik, ekspektasi masyarakat terhadap Polri melonjak tajam. Reformasi struktural telah banyak menghasilkan kemajuan, tetapi masalah budaya organisasi, pengawasan etik, dan perilaku kekuasaan masih menjadi sorotan. Gelombang kritik pasca-demonstrasi besar Agustus 2025 menunjukkan bahwa masyarakat kini menuntut pembaruan yang lebih menyentuh akar nilai: moralitas dan karakter.

### Perubahan Kultural

Politisi dan pengamat kepolisian Nasir Djamil menilai, setelah melewati fase reformasi dan transformasi, Polri kini memasuki babak restorasi.

“Dalam kaitannya dengan seruan reformasi Polri, maka saya lebih condong memilih pendekatan restorasi yang bertujuan untuk memperbaiki, mengembalikan, memulihkan, dan mencerahkan. Inti dari restorasi, menurut saya,

adalah memulihkan keadaan yang ‘sakit’ di tubuh Polri menjadi ‘sehat’ kembali,” tulis Nasir dalam tulisannya Restorasi Polri: Harapan itu Masih Ada.

Ia menilai, restorasi harus dilakukan menyeluruh pada tiga ranah: struktural, instrumental, dan kultural mencakup organisasi, doktrin, kewenangan, hingga manajemen sumber daya manusia. “Yang perlu dievaluasi dan di-restore adalah ketiga aspek itu, termasuk Grand Strategy Polri hingga tahun 2045 mendatang,” tulisnya.

Lebih jauh, Nasir menegaskan bahwa kritik terhadap Polri harus disikapi dengan hati dan pikiran terbuka. Restorasi, baginya, adalah proses pemulihan nilai dan kepercayaan publik, bukan semata koreksi kelembagaan.

“Upaya restorasi harus dibarengi dengan niat tulus dan keinginan kuat untuk memperbaiki, mengembalikan, dan memulihkan agar prinsip-prinsip kepolisian profesional dapat dihadirkan. Publik berharap polisi lebih bersih, adil, profesional, dan humanis.”

Senada, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

(Lemdiklat) Polri, Komjen Pol Prof Chryshnanda Dwilaksana berpendapat reformasi kepolisian harus dimaknai sebagai bagian dari pembangunan peradaban hukum yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan demokrasi. Polri bukan sekadar penegak aturan, melainkan pelindung hak-hak warga negara.

“Dalam konteks demokrasi, polisi harus menjadi ikon peradaban. Penegakan hukum adalah bentuk penyelesaian konflik secara beradab, bukan represif. Polisi menegakkan hukum untuk mencegah konflik yang lebih luas, melindungi masyarakat, dan membangun keteraturan sosial” ujarnya.

Restorasi bukan sekadar pembenahan sistem, melainkan upaya untuk mengembalikan roh pengayoman dan kemanusiaan yang menjadi dasar lahirnya kepolisian modern.

Langkah pembentukan Komite Reformasi Kepolisian dan Tim Akselerasi Transformasi Polri menandai kesadaran itu: bahwa reformasi sejati bukanlah respons terhadap tekanan publik, melainkan kesadaran moral untuk berubah. [\*]

**L****APORAN UTAMA**

# Jangkar Moral dan Karakter Pondasi

## REFORMASI KULTURAL

*Dalam setiap lembaga besar, selalu ada sosok yang menjadi jangkar moral yang menjaga arah ketika badai datang. Bagi Polri, nama itu adalah Hoegeng Imam Santoso.*



BF092F

**D**i atas meja kayu di rumah dinasnya, selembarnya putih tergeletak rapi. Jenderal Polisi Hoengeng Imam Santoso, Kapolri yang kelak dikenal sebagai legenda kejujuran, mulai menulis. Baru beberapa hari sebelumnya, ia dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Saat pulang ke rumah, matanya menangkap benda mencolok di ruang tamu: sebuah sound system Sony lengkap dengan mikrofon dan pengeras suara.

Barang mewah untuk ukuran masa itu, hadiah dari seseorang yang “ingin menyenangkan hati Kapolri baru.” Namun Hoengeng tahu, benda itu bukan sekadar hadiah. Ia sadar betul makna yang diselipkan di balik pemberian itu rayuan kekuasaan yang datang diam-diam lewat pintu rumahnya.

Alih-alih memanggil ajudan atau sekretaris, Hoengeng mengambil selembarnya kertas karbon dan menulis sendiri. Ia menulis dengan

dua suara yang hidup dalam dirinya: Hoengeng sebagai pribadi, dan Hoengeng sebagai pejabat negara. Di bagian atas ia tulis: “Hoengeng Pribadi versus Hoengeng Kapolri.”

Kalimat demi kalimat mengalir: “Hoengeng pribadi, terima kasih banyak atas kiriman sound system ini. Sesuai dengan hobi saya mendengarkan musik, tentu saya senang menerimanya.”

Namun, Hoengeng sebagai Kapolri menulis kalimat tandingan: “Ingat sumpah jabatanmu. Kau sudah berjanji tidak akan menerima apa pun karena jabatanmu.”

Ia menutup surat itu dengan satu kalimat pendek tapi abadi: “Dengan segala hormat, Hoengeng pribadi kalah. Hoengeng Kapolri menang.”

Surat itu ia tanda tangani sendiri, lalu memerintahkan stafnya untuk mengembalikan hadiah tersebut. Tidak ada marah, tidak ada drama hanya tindakan kecil yang memisahkan kepentingan pribadi dari tanggung jawab publik. Bertahun-tahun kemudian, wartawan senior Panda Nababan masih mengingat peristiwa itu. “Dia tunjukkan karbon suratnya ke saya. Tulis tangan, bukan formalitas. Dia benar-benar menulisnya sendiri,” ujar Panda dalam podcast TV Keadilan (8 Oktober 2025).

Bagi Hoengeng, pemberian yang datang karena jabatan adalah pelanggaran terhadap dirinya sendiri. Di situlah moralnya berakar: kejujuran bukan sekadar sikap, melainkan disiplin batin. Ia menunjukkan bahwa reformasi sejati tidak dimulai dari revisi undang-undang, tetapi dari keberanian seseorang melawan dirinya sendiri.



### Berani Belajar

Beberapa dekade setelah masa itu lewat nilai-nilai yang dipegang Hoegeng itu kembali menjadi sorotan. Gelombang kritik dan seruan reformasi Polri pasca-demonstrasi besar Agustus 2025 mengingatkan bahwa pembenahan sejati tak hanya terletak pada struktur dan sistem, tetapi pada moral dan karakter manusia di balik seragam.

Kalemdiklat Polri Komjen Pol Chryshnanda Dwilaksana, yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, menegaskan bahwa tujuan utama pembentukan tim ini adalah agar Polri mampu bertahan, tumbuh, dan terus berkembang.

“Kalau kita melihat namanya reformasi ya... di tubuh Polri ataupun diri kita sebagai manusia selalu mereformasi untuk bisa bertahan, tumbuh, dan berkembang. Memang harus selalu mereformasi,” kata Chryshnanda (detikPagi, 3 Oktober 2025).

Ia menambahkan, Polri harus mau mendengar berbagai masukan publik dan berani belajar dari masa lalu. “Kata ‘transformasi’ kalau menurut saya ini adalah berani belajar dan memperbaiki kesalahan di masa lalu, siap menghadapi tuntutan dan harapan masa kini, serta mampu menyiapkan masa depan yang lebih baik.”

Lebih lanjut, Chryshnanda menegaskan pentingnya menjadikan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman moral dalam setiap langkah perubahan. “Tujuannya adalah polisi ini bisa menjadi penjaga kehidupan, membangun peradaban, dan pejuang kemanusiaan, terefleksi dari Tribrata dan Catur Prasetya,” ujarnya.

Polri sejatinya tidak kekurangan tokoh teladan. Sejarah panjang kepolisian Indonesia menyimpan banyak figur yang menjadi jangkar moral dan sumber inspirasi bagi reformasi kultural hari ini. Nama Hoegeng menjadi simbol integritas tanpa kompromiseorang perwira



yang menolak segala bentuk gratifikasi dan tetap tegak di atas sumpah jabatannya.

Warisan moral semacam itu semestinya menjadi fondasi reformasi kultural Polri hari ini. Pembinaan sistem rekrutmen, pendidikan, dan karier yang berbasis meritokrasi harus diiringi dengan penanaman nilai keteladanan sejak dini. Reformasi kultural Polri harus dimulai dari inti: pembinaan moral, integritas, dan karakter anggota—fokus pada “moral, integritas, karakter,” serta kebangkitan kembali “budaya malu”.

Kisah Hoegeng mengingatkan bahwa keteladanan yang sederhana pun dapat menjadi kompas moral institusi besar. “Ingat sumpah jabatanmu,” tulisnya sebuah pesan yang tetap relevan di tengah upaya memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap Polri.

Tolok ukur keberhasilan restorasi kultural sesungguhnya sederhana namun tegas: persepsi dan pengalaman masyarakat. Ketika publik di berbagai daerah berkata bahwa polisi mereka “bersih”, di situlah reformasi kultural telah bekerja.

Akselerasi transformasi Polri yang berkelanjutan hanya akan berhasil jika dibangun di atas tiga pilar: kepemimpinan yang meneladani integritas, reformasi pendidikan dan karier yang menegakkan meritokrasi, serta pengawasan independen yang menjadikan nilai-nilai moral sebagai praktik keseharian. Dengan begitu, Polri benar-benar kembali pada jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Polri tidak kekurangan teladan. Tantangannya kini bukan menemukan, melainkan meneladani. [\*]

## Quick Wins

### Akselerasi Transformasi Polri

- **Larangan gaya hidup hedon (PNPP & keluarga)**

**Tindakan kunci:** sosialisasi larangan, pendataan dan penertiban perilaku glamor di medsos/kehidupan sehari-hari, amplify bukti kegiatan (foto/video) ke aplikasi Siap Presisi.

**Outcome:** citra anggota sederhana → kepercayaan publik naik.

- **Penertiban oknum arogan / tidak profesional**

**Tindakan kunci:** pengawasan publik dan sanksi, dokumentasi penindakan, amplifikasi kegiatan pengawasan di media resmi.

**Outcome:** menurunkan perilaku arogan; penguatan akuntabilitas internal.

- **Optimalisasi pengawasan melekat (Propam on duty)**

**Tindakan kunci:** penempatan personel Propam pada setiap kegiatan (inspeksi, asistensi, supervisi, monev), pelaporan mingguan jumlah personel Propam yang hadir.

**Outcome:** pencegahan pelanggaran disiplin/etik.

- **Optimalisasi Whistle-blower System (WBS) & SP4N-Lapor**

**Tindakan kunci:** sosialisasi WBS/SP4N, pendataan laporan & tindak lanjut mingguan, perlindungan pelapor (merujuk MoU dengan LPSK).

**Outcome:** mengurangi *code-of-silence*, meningkatkan integritas & transparansi.

- **Pelayanan publik berkualitas & anti-korupsi**

**Tindakan kunci:** standar layanan terpampang (persyaratan, alur, waktu penyelesaian), larangan menerima gratifikasi, e-survei (EpZi) dan testimoni video, transaksi resmi (PNBP).

**Outcome:** layanan cepat, transparan, bebas pungli → kepuasan publik naik.

- **Optimalisasi respons laporan publik (SPKT / layanan online)**

**Tindakan kunci:** dokumentasi & amplifikasi penerimaan laporan/tindaklanjut, penguatan peran SPKT untuk mempercepat *dispatch & travel time* (ukurannya: waktu respon), upload bukti di Siap Presisi.

**Outcome:** percepatan penanganan laporan; transparansi proses.

- **Optimalisasi Layanan Darurat Polisi 110**

**Tindakan kunci:** operator jaga kerahasiaan, beri arahan penyelamatan, koordinasi cepat lintas instansi; target penanganan (<30 menit, 30 menit–1 jam, >1 jam) dan publikasi bukti tindakan.

**Outcome:** respon darurat lebih cepat, kepercayaan publik meningkat.



# MEMBONGKAR SINDIKAT

**PEMBOBOL REKENING DORMAN**  
di Balik Pembunuhan Kacab BRI



**BANK**

*Komplotan tersebut meminta KCP bank menyerahkan user ID aplikasi Core Banking System milik teller disertai ancaman pembunuhan*

**T**umpukan uang kertas rupiah disusun memanjang di depan meja lobi Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Uang tunai tersebut ditempatkan dalam plastik bening, terdiri atas pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Siapa sangka, uang tersebut buah dari ketekunan penyidik Polri menelusuri dan mengembangkan kasus kematian Kepala Cabang Pembantu BRI Cempaka Mas, Jakarta Pusat, Mohamad Ilham Pradipta.

Kematian Ilham membuka tabir kejahatan luar biasa di perbankan, yakni modus pembobolan rekening dorman di salah satu bank BUMN dengan total nominal saldo Rp204 miliar oleh sekelompok sindikat.

Uang tersebut kini telah disita oleh polisi atas nama negara. Uang itu ditampilkan dalam jumpa pers yang digelar Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

“Jaringan sindikat pembobol bank yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset melakukan pertemuan dengan Kepala Cabang

Pembantu (KCP) salah satu bank yang ada di Jawa Barat untuk merencanakan pemindahan dana pada rekening dorman,” kata Dirlitipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2025).

Sindikat ini memulai aksi mereka sejak awal Juni 2025. Sindikat meminta KCP bank tersebut untuk menyerahkan user ID aplikasi Core Banking System milik teller. Permintaan itu disertai ancaman pembunuhan.



Permintaan yang disertai ancaman berujung pada kesepakatan membobol rekening dorman. Penyidik menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Dua di antaranya merupakan bagian dari otak perencanaan penculikan dan pembunuhan Ilham Pradipta.

### Ancam Keselamatan

Kasus kematian Ilham ternyata memiliki kaitan dengan laporan dari pihak bank ke kepolisian pada 20 Juni 2025. Ironisnya, oknum kepala cabang bank yang terpaksa terlibat dalam kejahatan ini juga menyepakati pembagian hasil kejahatan.

“Mereka memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi Core Banking System milik teller dan kepala cabang. Apabila tidak mau melaksanakan, akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya,” ujar Brigjen Helfi.

Para tersangka dalam sindikat itu dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu mereka yang merupakan klaster karyawan bank yakni AP (50) selaku Kepala Cabang Pembantu dan GRH (43) selaku Consumer Relations Manager. Sedangkan mereka yang masuk kelompok eksekutor yakni C (41) selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan

pemindahan dana dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia; kemudian DR (44) selaku konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku; NAT (36) selaku mantan pegawai bank yang melakukan akses ilegal pada aplikasi core banking system; R (51) selaku mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank; serta TT (38) selaku fasilitator keuangan ilegal.

Sementara yang dikelompokkan sebagai klaster pencuci uang yakni DH (39) selaku pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobolan bank untuk melakukan pembukaan





blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir, serta IS (60) yang berperan menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan.

#### Aksi Tersangka

Peran C selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana tersebut. Dialah yang mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset. Dia juga yang mengarang cerita bahwa sedang menjalankan tugas negara secara rahasia.

Ia bahkan membuat ID card palsu yang mencantumkan identitas salah satu lembaga pemerintah agar kepala cabang yakin. Sasaran pertama adalah Kepala Cabang Pembantu BNI di Jawa Barat, yakni tersangka AP, yang akhirnya memberikan akses ke aplikasi core banking untuk melakukan pemindahan dana secara in absentia.

Peran tersangka DH (Dwi Hartono) adalah melakukan pencucian uang. Ia berkoordinasi dengan para eksekutor pembobolan

untuk memindahkan dana dari rekening terblokir.

Tersangka GRH (43) yang merupakan Consumer Relations Manager (CRM) BNI Cabang Pembantu juga akhirnya terlibat dan berperan sebagai penghubung antara jaringan sindikat pembobol bank dengan kepala cabang pembantu.

Kemudian DR (44), yang berperan sebagai konsultan hukum untuk melindungi sindikat pembobol bank serta aktif dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana.

SAH WUJUD PELAYANAN PUBLIK  
ANG PERPUSTAKAAN



*“Pemberi informasi rekening dormant diinformasikan berinisial S ya (yang kasus di Polda Metro Jaya), untuk di kita inisial D sedang dalam proses pencarian,”*

Selanjutnya NAT (36), yang merupakan mantan teller BNI, melakukan akses ilegal di aplikasi serta memindahkan dana di rekening dormant ke lima rekening penampungan.

Lebih lanjut, tersangka R (51) berperan sebagai mediator untuk mencari dan mengenalkan kepala cabang serta menerima aliran dana hasil kejahatan.

Terakhir, tersangka TT (38) berperan menerima dan mengelola uang hasil kejahatan, dan tersangka

IS (60) berperan menyiapkan rekening penampungan serta menerima uang hasil kejahatan.

### Sumber Informasi

Bareskrim Polri telah mengantongi identitas pemberi informasi adanya rekening dormant sebesar Rp204 miliar di salah satu bank. Diduga, informasi itulah yang kemudian digunakan sindikat untuk membobol rekening korban.

“Pemberi informasi rekening dormant tadi diinformasikan



berinisial S ya (yang kasus di Polda Metro Jaya), untuk di kita inisial D sedang dalam proses pencarian," ungkap Brigjen Helfi.

Penyidik perlu memeriksa sosok D untuk mengungkap keseluruhan rangkaian praktik pembobolan rekening tersebut. Meski begitu, Helfi belum menjelaskan lebih jauh siapa dan apa latar belakang dari sosok D, begitu pula terkait dengan siapa D berkoordinasi langsung.

Yang tak kalah mencengangkan, terkuak para pelaku hanya membutuhkan waktu 17 menit untuk memindahkan uang ratusan miliar rupiah. Eksekusi pemindahan dana rekening dormant dilakukan pada Jumat pukul 18.00 WIB setelah jam operasional, untuk menghindari sistem deteksi bank.

Usai berhasil mengasak rekening dormant, pelaku melakukan penukaran uang dengan valuta asing (valas), seterusnya valas ditempatkan ke rekening penampung yang telah disiapkan.

Akibat perbuatannya, para tersangka terancam dijerat Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juncto Pasal 55 KUHP.

Kemudian, Pasal 46 ayat (1) juncto Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Selanjutnya, Pasal 82 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, serta Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. [\*]

## Kasus pembobolan rekening dormant

Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap kasus pembobolan rekening pasif atau dormant di cabang salah satu bank di Jawa Barat. Dana yang dicuri sindikat pembobol rekening mencapai ratusan miliar rupiah.

Nilai pembobolan  
**Rp204 miliar**

Sindikat mencincar rekening dormant milik pengusaha tanah (S).

### Konstruksi kasus

Data Polri, 25 September 2025

Sindikat menemui ketua cabang bank pembantu (AP) pada awal Juni 2025 dengan mengaku sebagai satgas perampasan aset.

Sindikat mengancam AP, selanjutnya memindah dana pada akhir Juni 2025 sebanyak 42 kali.

Dana ditampung di 5 rekening kemudian ditukar valas, aset, dan investasi fiktif.

Bank melaporkan kejadian transaksi mencurigakan ke Bareskrim Polri.



#### Pihak bank

- AP (50)**  
Menyerahkan akses sistem bank untuk melakukan pemindahan dana.
- GRH (43)**  
Menghubungkan AP dan sindikat.

#### Sindikat pembobol

- C (41)**  
Merencanakan dan mengeksekusi pembobolan rekening.
- DR (44)**  
Membantu perencanaan dan eksekusi.
- NAT (36)**  
Melakukan akses ilegal dan memindahkan dana ke rekening penampung.

#### Tersangka dan peran

- R (51)**  
Mengenalkan sindikat kepada AP.
- TT (38), DH (39), IS (60)**  
Menyiapkan rekening penampung.
- D (buron)**  
Memberi informasi rekening dormant ke sindikat.

#### Keterangan:

Tersangka C dan DH merupakan tersangka kasus pembunuhan kepala cabang bank di Jakarta.

### Ancaman hukuman

Berpotensi terkena pasal berlapis:



Penjara maksimal **6 tahun** dan denda maksimal **Rp600 juta**

UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



Penjara maksimal **20 tahun** dan denda maksimal **Rp20 miliar**

UU tentang Transfer Dana



Penjara maksimal **20 tahun** dan denda maksimal **Rp10 miliar**

UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

“Penyidik berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal.”

### Brigjen Pol. Helfi Assegaf

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri



Kortastipidkor Polri,  
**Kasus Korupsi PLTU Kalbar  
Rugikan Negara Rp1,35 Triliun**

**PLTU**

Di balik proyek mangkrak PLTU 1 Kalbar, penyidik mengungkap permufakatan jahat, pengalihan pekerjaan, dan pencucian uang lintas negara.

**K**orps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Kalimantan Barat dari Polda Kalbar.

Kasus ini dikategorikan sebagai high profile karena besarnya kerugian keuangan negara, kerumitan perkara, serta keterlibatan pihak asing dalam proyek tersebut.

Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Cahyono Wibowo menjelaskan, pengambilalihan dilakukan agar penyidikan berjalan lebih efektif.

"Kenapa diambil alih, ya, ini kami pandang sebagai (kasus) high profile," ujar Cahyono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Senin (6/10/2025), seperti dikutip dari Tempo.

Ia menambahkan, klasifikasi high profile ditentukan berdasarkan faktor calon tersangka, nilai kerugian, tingkat kerumitan, serta adanya keterlibatan pihak luar negeri, di antaranya Alton dari Singapura dan OJSC dari Rusia.



## Pengalihan Proyek

Penyidik menemukan adanya permufakatan jahat sejak proses lelang proyek berlangsung.

Proyek pembangunan PLTU 1 Kalbar di Desa Jungkat, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah, yang berjalan sejak 2008 hingga 2018, dikerjakan oleh Konsorsium (KSO) PT Bakti Reka Nusa (BRN) bersama dua perusahaan asing.

Namun, setelah kontrak ditandatangani, pekerjaan justru dialihkan sepenuhnya kepada PT Praba Indopersada (PI), yang diketahui tidak memiliki kapasitas di bidang konstruksi pembangkit listrik.

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Pol. Totok Suharyanto mengungkapkan, panitia pengadaan proyek meloloskan dan memenangkan KSO BRN -Alton- OJSC meskipun tidak memenuhi syarat teknis maupun administrasi.

"Diduga kuat perusahaan Alton dan OJSC tidak tergabung dalam KSO yang dibentuk dan dikepalai oleh PT BRN," kata Totok, dikutip dari ANTARA.

Pengalihan pekerjaan ini memunculkan berbagai pelanggaran, mulai dari spesifikasi peralatan yang tidak sesuai standar hingga penggunaan tenaga kerja asing asal Tiongkok tanpa izin resmi.

Dari hasil gelar perkara, penyidik menetapkan empat tersangka, yaitu: FM, mantan Direktur Utama PLN periode 2008-2009, HK, Presiden Direktur PT Bakti Reka Nusa, RR, Direktur Utama PT BRN, HYL, Direktur Utama PT Praba Indopersada.

"Pada tanggal 3 Oktober 2025, kami tetapkan sebagai tersangka melalui mekanisme gelar perkara," kata Irjen Cahyono Wibowo, sebagaimana dikutip ANTARA.

Keempatnya diduga berperan dalam pengaturan proyek untuk memenangkan konsorsium tertentu dan mengalihkan pekerjaan secara melawan hukum.

Kontrak proyek ditandatangani pada 11 Juni 2009 dengan nilai USD 80,84 juta dan Rp507,4 miliar, namun progres pekerjaan hanya mencapai 85,56 persen hingga proyek berhenti pada 2016.





### Kerugian Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan nilai kerugian negara mencapai Rp1,35 triliun, terdiri atas USD 62,4 juta dan Rp323 miliar yang sudah dibayarkan oleh PLN kepada KSO BRN.

"Total kerugian keuangan negaranya itu Rp1,35 triliun dengan kurs sekarang," ujar Cahyono dikutip dari ANTARA Kalbar.

Polri juga menelusuri adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil kejahatan tersebut. Penyidik menduga sebagian dana mengalir ke sejumlah pihak melalui rekening penampungan di luar negeri.

"Dari hasil penelusuran kami, ada beberapa pihak yang sudah ada penerimaan aliran dana. Kami akan rilis kembali terkait pihak yang akan kami tetapkan berikutnya dengan dilapisi pasal TPPU," kata Cahyono.

Polri belum melakukan penahanan terhadap para tersangka karena masih melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan kejaksaan. "Kalau untuk ditahan belum, kami belum," ujar Cahyono kepada wartawan di Mabes Polri, dikutip dari MetroTVNews.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.



*MotoGP Mandalika 2025:*  
**POLRI HADIRKAN  
KEAMANAN  
KELAS DUNIA**

Pengamanan dilakukan di semua lini darat, laut dan pemantauan udara lewat Satgas Drone, serta ruang siber.

**D**ebu tipis berterbangan di langit Mandalika saat deru mesin MotoGP memecah siang Lombok Tengah, 5 Oktober 2025. Suara penonton membahana dari tribun utama, menciptakan atmosfer yang tak hanya panas oleh kecepatan, tapi juga oleh semangat ribuan orang yang datang dari berbagai penjuru dunia.

Di balik gegap gempita itu, ribuan personel Polri berdiri siaga. Sejak pagi hingga malam, mereka mengawal arus kendaraan,

mengatur ribuan penonton, hingga memastikan setiap sudut sirkuit aman.

Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 atau MotoGP Mandalika tahun ini mencatat rekor baru: 140.324 penonton hadir selama dua hari penyelenggaraan angka tertinggi sejak Mandalika resmi masuk kalender MotoGP dunia.

Menurut data Mandalika Grand Prix Association (MGPA), jumlah tersebut meningkat tajam

dibanding 121 ribu penonton pada 2024. Tak hanya tribun yang penuh, area paddock dan hospitality village juga mencatat lonjakan pengunjung hingga 36 persen.

“Peningkatan penonton yang begitu besar menunjukkan Mandalika semakin dicintai dunia,” ujar Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA. “Dan rasa aman menjadi faktor penting yang membuat penonton ingin kembali.”



*“Setiap penonton adalah tamu negara yang harus dilayani dengan ramah dan profesional,”*

### Pengamanan Berlapis

Sebanyak 3.572 personel gabungan dikerahkan dalam Operasi Mandalika Rinjani 2025 yang terdiri dari 2.580 personel Polri dan unsur-unsur terkait lainnya. Ribuan personel gabungan tersebut diterjunkan menjaga setiap titik vital: bandara, pelabuhan, jalur utama, hingga area sirkuit.

Operasi terpadu dijalankan secara preventif, preemtif, dan represif dengan langkah terukur hasilnya, seluruh rangkaian acara berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Sementara itu, sistem pengamanan dibagi dalam tiga zona utama barat, tengah, dan timur yang mencakup sirkuit, area wisata, hingga jalur logistik dan transportasi.

Asisten Staf Utama Kapolri Bidang Operasi Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, turun langsung memantau kesiapan pasukan. Ia menegaskan bahwa keamanan menjadi wajah Indonesia di mata dunia.

“Jadi Mandalika bukan sekadar balapan. Ini adalah panggung Indonesia di mata internasional. Kita tahu, tantangan di sini besar, lalu lintas yang padat, kerumunan berpotensi rawan hingga ancaman kriminalitas dan siber,” kata Fadil di Mandalika, Jumat sore (3/10/2025).

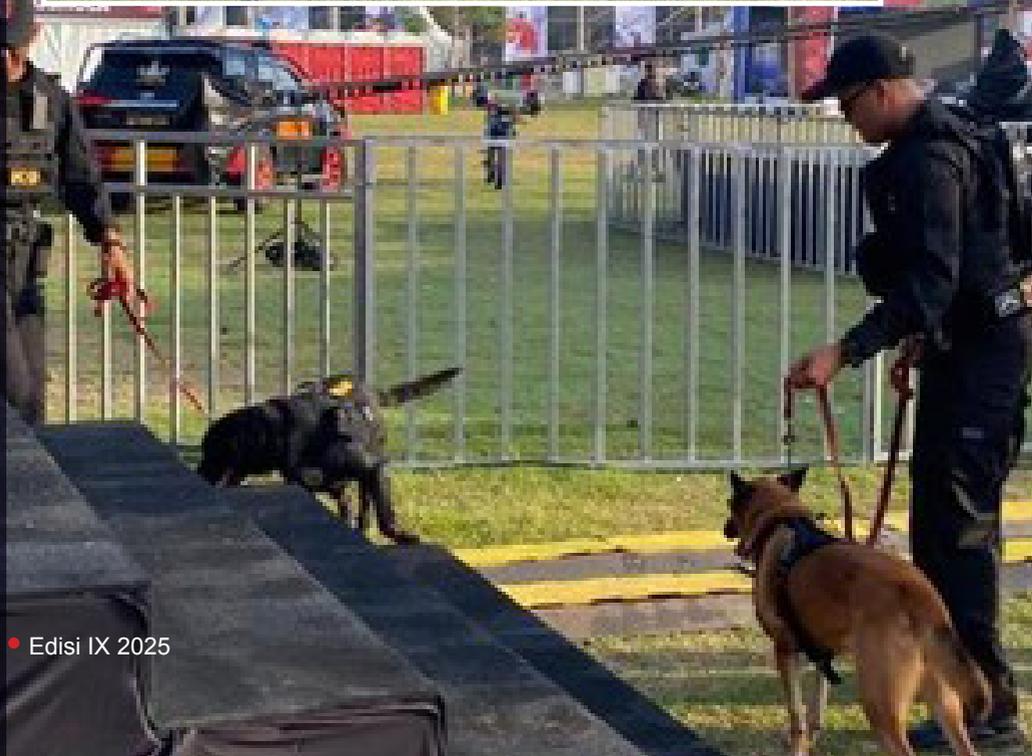
Pengamanan dilakukan di semua lini: patroli darat, penjagaan laut oleh Ditpolairud, pemantauan udara lewat Satgas Drone, hingga pengawasan ruang siber bersama BSSN dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. “Setiap penonton adalah tamu negara yang harus dilayani dengan ramah dan profesional,” tegasnya.

Sebelum balapan dimulai, tim Polsatwa K9 Polda NTB telah bergerak sejak dini hari. Tiga anjing pelacak yang dinamai Ira, Feia,

dan Rokky menyisir hotel, area VIP, dan seluruh akses utama sirkuit. Hasilnya, seluruh titik dinyatakan steril dari ancaman.

“Sterilisasi berjalan lancar dan nihil temuan,” ujar Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid.

Sementara itu, Satgas Drone Mabes Polri ditempatkan di Bukit Jokowi dekat Sirkuit Mandalika. Dengan sistem anti-drone jammer, setiap drone tak berizin dapat dilumpuhkan dalam hitungan detik.





### Tuai Pujian

Tiga hari penyelenggaraan MotoGP menjadi gambaran kolaborasi solid antara Polri, panitia, dan pemerintah daerah. Arus kendaraan lancar, area penonton tertib, dan suasana kondusif.

Eithen, penonton asal Amerika Serikat, mengaku terkesan dengan kelancaran transportasi.

“Lalu lintasnya sangat bagus, bus antar-jemput teratur, dan saya merasa aman sepanjang acara,” ujarnya.

Ebi, penonton asal Jakarta, memuji sistem satu arah yang diterapkan. “Meski ramai, semuanya lancar. Parkir tertib dan mudah dijangkau,” katanya.

Warga lokal pun bangga. “Keamanan dan lalu lintas dijaga luar biasa. Kami senang Mandalika dikenal dunia karena ketertibannya,” tutur Sukardi, warga Lombok Tengah.

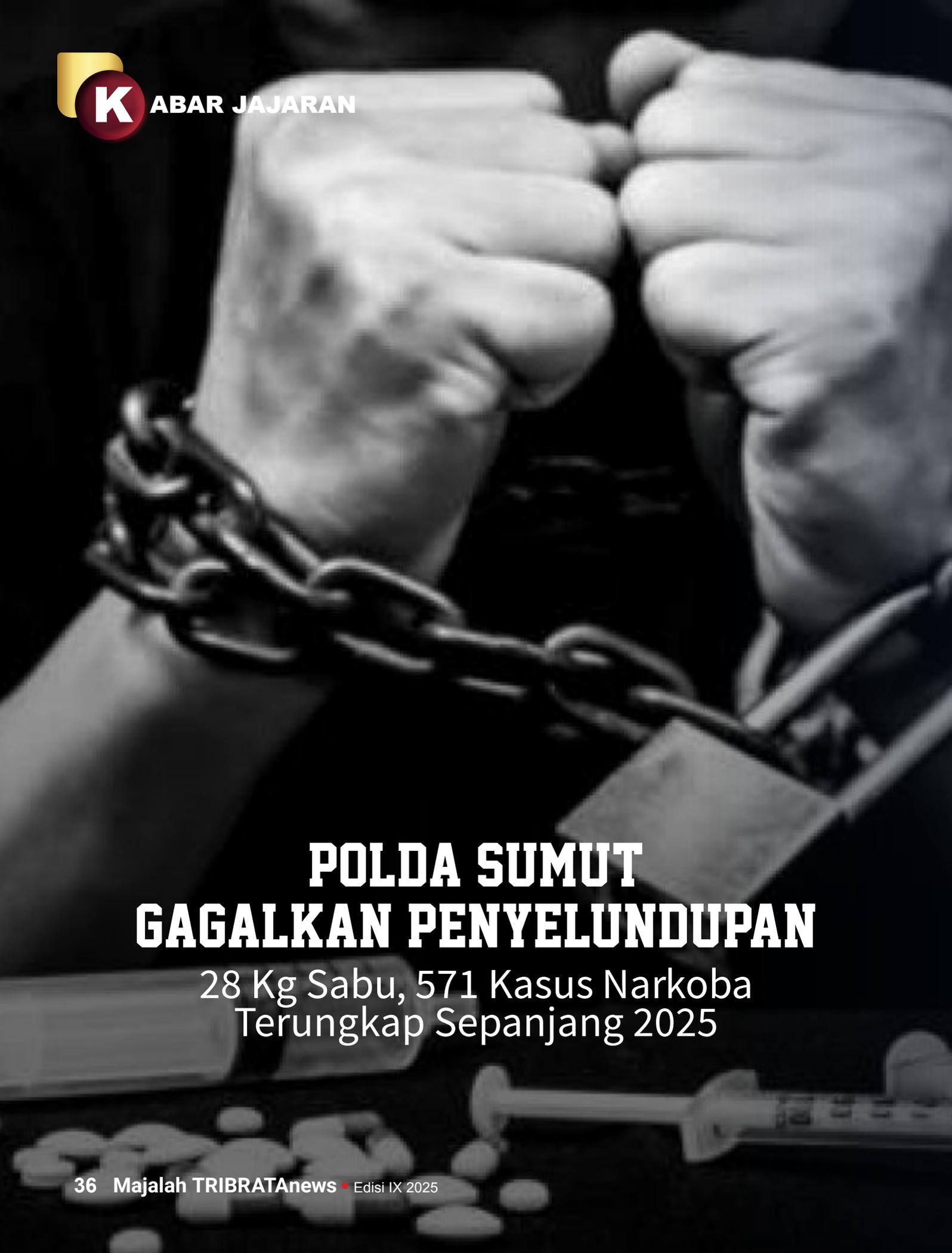
Kinerja Polda NTB dalam Operasi Mandalika Rinjani 2025 kembali menuai pujian. Pengamanan yang berlangsung aman, tertib, dan tanpa insiden besar mendapat apresiasi langsung dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yulianti, saat kunjungan kerja di Gedung Sasana Dharma, Polda NTB, Senin (6/10/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kinerja mitra kerja Komisi III di daerah, khususnya pasca-event berskala global seperti MotoGP Mandalika.

“Keberhasilan pengamanan ini menjadi pesan kuat bagi dunia bahwa Lombok dan Indonesia adalah tuan rumah yang andal, aman, dan siap menyelenggarakan event kelas dunia,” kata Sari Yulianti. “Setiap keberhasilan seperti ini meningkatkan kepercayaan internasional terhadap kita. Ini kebanggaan bersama yang wajib dijaga,” tambah Sari.

Kesuksesan MotoGP Mandalika 2025 menjadi cermin profesionalisme Polri di panggung dunia: kolaboratif, presisi, dan humanis.

Dari Mandalika, Indonesia kembali menegaskan diri sebagai tuan rumah yang aman, ramah, dan berkelas dunia sementara Polri menunjukkan bahwa tugas menjaga negeri tak sekadar soal keamanan, tetapi juga soal menjaga kepercayaan dunia. [\*]



# **POLDA SUMUT GAGALKAN PENYELUNDUPAN**

28 Kg Sabu, 571 Kasus Narkoba  
Terungkap Sepanjang 2025



*“Kedua tersangka berdomisili di Tanjungbalai. Barang haram tersebut rencananya akan dibawa ke Palembang,”*

Satresnarkoba Polres Labuhanbatu melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat.

“Kedua tersangka berdomisili di Tanjungbalai. Barang haram tersebut rencananya akan dibawa ke Palembang,” jelas Calvijn saat konferensi pers di Mapolda Sumut, Selasa (7/10/2025).

Para pelaku menerima uang muka Rp10 juta dan dijanjikan upah Rp100 juta bila sabu berhasil dikirim ke tujuan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui ada dua pengendali jaringan berstatus DPO, yang salah satunya merupakan pemasok dari Malaysia.

Pengungkapan berikutnya terjadi Minggu (28/9/2025) sekitar pukul 00.05 WIB. Dua tersangka, Suherman (36) warga Asahan, dan Khairul Jefri (27) warga Tanjungbalai, ditangkap saat melintas di Jalan Lintas Aek Nabara Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu.

Dari dalam mobil Daihatsu Xenia hitam, polisi menemukan tas ransel hitam merek Nike berisi 15 bungkus plastik kuning bertuliskan aksara Cina “Nian Nian You Yu”, masing-masing seberat satu kilogram sabu.

Barang haram tersebut dikendalikan oleh IFH (DPO) yang berdomisili di Asahan, dan rencananya akan dikirim kepada seseorang berinisial “Pakcik” di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

**D**irektorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara kembali menorehkan capaian besar dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika lintas provinsi.

Dalam dua operasi terpisah, polisi berhasil menggagalkan penyelundupan 28 kilogram sabu-sabu dan mengamankan empat tersangka.

**Kasus Pertama: 13 Kilogram Sabu Tujuan Palembang**

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak menjelaskan, pengungkapan pertama melibatkan dua tersangka berinisial P dan A.

Keduanya ditangkap di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, setelah tim gabungan Ditresnarkoba dan

Kedua pelaku dijanjikan upah Rp67,5 juta atau Rp4,5 juta per kilogram sabu. Hasil penyidikan juga mengungkap bahwa keduanya sudah tiga kali melakukan pengiriman sabu pada tahun 2025, dengan total 29 kilogram. "Mereka pernah mengirim 6 kg, 8 kg, dan terakhir 15 kg. Kini pengendalinya IFH telah masuk daftar pencarian orang," ujar Calvijin.

Keduanya dijerat Pasal 114 Ayat (2) subsider Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

## 571 Kasus Terungkap

Selain dua kasus besar tersebut, Ditresnarkoba Polda Sumut mencatat keberhasilan signifikan sepanjang 1 Januari hingga 6 Oktober 2025. Sebanyak 571 kasus tindak pidana narkoba berhasil diungkap, dengan 649 tersangka diamankan dari berbagai wilayah Sumatera Utara.

Barang bukti yang disita antara lain sabu: 42,8 kilogram, ganja: 3,3 kilogram, pil ekstasi: 1.190 butir dan Happy Five: 28 butir. Nilai ekonomi barang bukti diperkirakan mencapai Rp42,75 miliar, dan lebih dari 225 ribu jiwa berhasil diselamatkan dari dampak penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil pemetaan, empat wilayah menjadi fokus penindakan karena tergolong daerah rawan peredaran narkoba, yaitu Rantau Utara dan Rantau Selatan di Kabupaten Labuhanbatu, serta Kota Pinang dan Torgamba di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Penindakan banyak dilakukan di barak-barak dan loket narkoba di kawasan perkebunan sawit, serta tempat hiburan malam (THM) seperti Karaoke Sky dan Hans Station.

Di Karaoke Sky, petugas menyita 685 butir pil ekstasi dan mengamankan lima tersangka, sementara di Hans Station





diamankan satu tersangka. Dua pengguna yang positif narkoba langsung menjalani rehabilitasi.

Dalam menekan peredaran di wilayah rawan, Ditresnarkoba bersama Polres jajaran menggelar Operasi Gerebek Sarang Narkoba (GSN) secara rutin. Dari hasil kegiatan

67 operasi di barak dan loket narkoba menghasilkan 8 kasus, 9 tersangka, dan 5,3 gram sabu. Juga 15 operasi di tempat hiburan malam menghasilkan 4 kasus, 6 tersangka, serta menyita 685 butir ekstasi, 9,47 gram serbuk ekstasi, dan 34,24 gram sabu.

Polisi juga memetakan lima modus utama yang kerap digunakan jaringan pengedar, yakni jalur transportasi darat lintas provinsi dan jalur protokol, distribusi di wilayah pinggiran seperti sawah, sungai, barak, dan perkebunan. Lalu aktivitas tersembunyi di hotel, rumah kontrakan, dan kos-kosan serta transaksi terselubung di warung, minimarket, dan SPBU serta yang terakhir peredaran di tempat hiburan malam.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menegaskan bahwa upaya masif pemberantasan narkoba ini

merupakan dukungan terhadap program Astacita ke-7 Presiden RI Prabowo Subianto, sekaligus bentuk implementasi arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Perang terhadap narkoba tidak bisa ditawar-tawar. Kita harus terus bergerak melakukan pencegahan, penindakan, dan penyelamatan masyarakat dari bahaya narkoba,” tegas Ferry. [\*]

# TIM DVI POLRI TERUS BEKERJA

Identifikasi Korban Musala Ambruk di Sidoarjo



Langit mendung menaungi kompleks Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, ketika deretan mobil ambulans bergantian datang ke RS Bhayangkara Surabaya. Di balik pintu rumah sakit itu, tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur terus bekerja, mengidentifikasi para korban runtuhnya bangunan musala yang menelan puluhan jiwa.

"Pada Selasa, 7 Oktober 2025, tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 18 kantong jenazah yang terdiri

dari 17 jenazah dan 1 body part. Delapan belas kantong jenazah cocok atau match dengan 17 nomor ante mortem," ujar Kabiddokkes Polda Jatim Kombes Dr. dr. Mohammad Khusnan Marzuki di RS Bhayangkara, Rabu (8/10/2025).

Keterangan itu menandai capaian penting dalam proses panjang identifikasi yang dilakukan sejak awal Oktober. Dari 17 jenazah tambahan yang berhasil diungkap identitasnya, 13 di antaranya teridentifikasi melalui DNA dan pemeriksaan medis, dua melalui kombinasi medis dan properti, satu

melalui sidik jari dan medis, serta satu lainnya melalui gigi dan medis. Dengan hasil terbaru ini, total 34 korban telah berhasil diidentifikasi yakni lima di Sidoarjo dan 29 di RS Bhayangkara.

Hingga Senin (6/10), rumah sakit tersebut telah menerima 62 kantong jenazah, sementara lima kantong lainnya lebih dulu diterima di Sidoarjo.

"Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 34 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI

masih berjalan dengan melakukan pendalaman dari ante mortem dan juga post mortem,” ujar Kombes Khusnan.

Ia menjelaskan, dari total jenazah yang diterima, masih ada 33 yang belum teridentifikasi. Sebanyak 14 sampel DNA telah dikirim ke Pusdokkes Polri di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Proses tersebut, katanya, memerlukan ketelitian tinggi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kemanusiaan.

### Fokus pada Kemanusiaan

Peristiwa ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny terjadi pada 29 September 2025. Tragedi itu mengejutkan masyarakat luas karena jumlah korban yang besar dan proses evakuasi yang penuh tantangan.

Tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, Basarnas, serta relawan bekerja siang malam untuk menemukan para korban.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menegaskan bahwa prioritas utama kepolisian saat ini adalah kemanusiaan: memastikan seluruh korban teridentifikasi dan diserahkan kepada keluarga mereka dengan hormat.

“Proses identifikasi dari tim DVI masih terus dilakukan. Untuk keluarga korban yang sedang berduka, kami mohon agar kita semua berempati. Biarkan seluruh proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Percayalah, kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).

Abast juga mengonfirmasi bahwa proses pencarian dan evakuasi di lokasi kejadian telah dinyatakan selesai oleh Basarnas namun proses identifikasi jenazah korban belum berakhir. Meski fokus utama masih pada proses identifikasi, Polda Jawa Timur memastikan bahwa langkah penegakan hukum akan tetap dilakukan.

“Perlu saya tegaskan kembali bahwa Polda Jawa Timur sejauh ini telah menyampaikan pernyataan resmi dari Bapak Kapolda bahwa proses hukum akan kami lakukan,” kata Kombes Abast.

Tim penyidik Ditreskrim Polda Jatim telah mulai memeriksa sejumlah pihak yang terlibat dalam pembangunan musala, termasuk pihak kontraktor dan pengawas lapangan. Selain itu, sampel material bangunan turut dikirim ke laboratorium forensik untuk memastikan penyebab runtuhnya struktur bangunan tiga lantai tersebut.

“Kami mohon waktu karena tim DVI masih bekerja. Setelah seluruh jenazah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, barulah kami akan melangkah ke tahap selanjutnya,” pungkas Kombes Abast.



# Ojol Kamtibmas: Sinergi Baru Polri dan Warga Menjaga Jakarta



*Polda Metro Jaya menggandeng komunitas pengemudi ojek online sebagai mitra untuk menjaga keamanan di jalanan Jakarta.*



Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas ibu kota, suara deru kendaraan bercampur dengan derai hujan yang turun tipis di kawasan Juanda, Jakarta Pusat. Namun, di halaman Polsubsektor Juanda, suasana tampak berbeda.

Puluhan pengemudi ojek online (ojol) berdiri berjejer dengan wajah antusias. Mereka hadir bukan untuk mengambil penumpang, melainkan menghadiri peluncuran program kemitraan baru antara kepolisian dan komunitas ojol, yang diberi nama Ojol Kamtibmas.

Program ini digagas Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sebagai langkah memperluas keterlibatan masyarakat dalam

menjaga keamanan dan ketertiban. Melalui inisiatif ini, para pengemudi ojol diajak menjadi mitra strategis kepolisian di jalan raya bukan hanya mengantar penumpang, tetapi juga turut mengamati, merekam, dan melaporkan tindak kriminalitas yang terjadi di sekitar mereka.

"Kalau ada tindakan kriminal di jalan, kami akan berikan apresiasi, bahkan reward sebesar Rp500 ribu dari Kapolda jika ada rekaman kejadian penting yang membantu pengungkapan kasus," ujar Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono, dalam kegiatan bersama komunitas ojol, Jumat (26/9/2025).



Pernyataan tersebut menjadi penanda komitmen baru Polri untuk membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas. Menurut Dekananto, pemberian bonus bukanlah tujuan utama, melainkan penyemangat agar masyarakat mau terlibat aktif dalam menjaga keamanan.

"Ini hanya untuk penyemangat. Saya yakin, ke depan, tanpa ada bonus pun, teman-teman ojol tetap akan memberikan informasi karena ini bagian dari tanggung jawab bersama."

## Mitra Strategis

Polda Metro Jaya menilai, para pengemudi ojol merupakan kelompok masyarakat yang paling sering bersinggungan langsung dengan situasi di lapangan. Mereka nyaris hadir di setiap sudut kota dan sering kali menjadi saksi pertama berbagai peristiwa di jalanan.

"Teman-teman ojol ini hampir 24 jam berada di jalanan. Kalau menemukan atau melihat kejadian kejahatan, bisa langsung melaporkan. Akan diberikan bonus oleh Bapak Kapolda," jelas Dekananto.

Namun, ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan. "Jangan sampai ada yang pura-pura menyuruh temannya melakukan kejahatan hanya untuk direkam lalu dilaporkan supaya dapat Rp500 ribu. Itu tidak boleh," tegasnya.

Wakapolda menekankan bahwa upaya ini bukan karena kepolisian tidak mampu menjalankan tugasnya, tetapi karena Polri ingin melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan.



“Bukan karena kami tidak mampu, tetapi karena kami ingin melibatkan masyarakat. Kita ingin merasakan sama-sama bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, Polda Metro Jaya secara resmi membentuk Komunitas Ojol Kamtibmas. Komunitas ini diharapkan menjadi wadah sinergi antara pengemudi ojol dan kepolisian dalam menjaga keamanan ibu kota. Para anggota akan didata melalui Polres dan Polsek setempat agar koordinasi pelaporan bisa berjalan efektif dan cepat. “Ojol Kamtibmas adalah bentuk kemitraan antara Kapolda Metro Jaya dengan teman-teman ojol,” ujar Dekananto.

Ia menambahkan bahwa setiap anggota komunitas akan menjadi perpanjangan mata dan telinga kepolisian di lapangan. “Teman-teman juga menjadi polisi bagi diri masing-masing dan lingkungan masing-masing nanti,” katanya.

*“Ojol Kamtibmas adalah bentuk kemitraan antara Kapolda Metro Jaya dengan teman-teman ojol,”*



#### Posko Komunitas

Polda Metro Jaya juga berencana menggelar apel besar Ojol Kamtibmas se-Jakarta di kawasan Monumen Nasional (Monas) yang rencananya akan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Apel tersebut akan menjadi momentum mempererat kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menjaga situasi keamanan Jakarta.

Di sela kegiatan itu, gerai Rakyat Mart turut diresmikan sebagai posko komunitas sekaligus ruang koordinasi antara ojol dan kepolisian. Gerai ini berfungsi sebagai pusat informasi dan tempat berkumpulnya anggota komunitas untuk berkoordinasi dalam pelaporan kamtibmas.

Wakapolda menjelaskan, kepolisian juga akan memastikan agar setiap laporan dari para pengemudi diterima dengan baik oleh petugas di lapangan. “Saya yakin kalau misalnya ada laporan yang ditolak, tolong laporkan dengan saya,” ujarnya memberi jaminan.

Kepolisian menyadari bahwa menjaga keamanan di wilayah sebesar Jakarta bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri. Karena itu, keterlibatan masyarakat termasuk komunitas ojol menjadi kekuatan penting.

“Polisi menyadari bahwa menjaga kamtibmas tidak bisa sendiri. Tanpa dukungan potensi masyarakat, komunitas, dan lain-lain, tantangan ke depan semakin berat,” kata Dekananto.

Program Ojol Kamtibmas menegaskan arah baru Polri dalam memperkuat hubungan dengan masyarakat. Dari upaya pembinaan komunitas, pemberian apresiasi, hingga pelibatan warga dalam pengawasan sosial, semuanya menunjukkan semangat baru Polri yang lebih terbuka, humanis, dan kolaboratif.

Dengan inisiatif ini, para pengemudi ojol kini memiliki peran lebih dari sekadar pengantar penumpang. Mereka menjadi bagian dari jaringan keamanan sosial di ibu kota membantu menciptakan Jakarta yang lebih aman, tertib, dan berempati. [\*]

# Ambulans Motor, Inovasi Layanan Kesehatan Hingga ke Pelosok



*Hadir di jalan raya hingga perkampungan, Polri membawa pelayanan kesehatan yang cepat, responsif, dan humanis melalui program patroli kesehatan menggunakan ambulans motor.*

**D**eru kendaraan siang itu memenuhi ruas Jalan Majapahit, Kota Semarang. Di antara padatnya arus lalu lintas, dua sepeda motor dinas bertuliskan Ambulans Biddokkes Polda Jateng melaju lincah menembus kemacetan.

Di balik helm dan rompi reflektif, petugas medis berseragam Polri membawa misi kemanusiaan, memberikan pertolongan cepat kepada siapa pun yang membutuhkan di jalan.

Ini wajah baru pelayanan Polri di bidang kesehatan. Patroli kesehatan menggunakan ambulans motor menjadi inovasi yang digagas Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Tengah untuk menjangkau area padat lalu lintas maupun wilayah yang sulit diakses kendaraan roda empat.

Kabid Dokkes Polda Jateng Kombes Pol drg. Agustinus MHT menjelaskan bahwa ambulans motor merupakan bentuk pelayanan kesehatan lapangan yang cepat, tanggap, dan humanis.



*“Patroli ini tidak hanya berfokus pada kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di jalan, tetapi juga menjadi sarana hadirnya Polri dalam memberikan pelayanan yang proaktif dan dekat dengan masyarakat,”*

“Patroli ini tidak hanya berfokus pada kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat di jalan, tetapi juga menjadi sarana hadirnya Polri dalam memberikan pelayanan yang proaktif dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Dalam setiap patroli, tenaga medis Biddokkes memberikan pemeriksaan tekanan darah, pertolongan pertama, serta edukasi kesehatan ringan kepada masyarakat.

Saat ini, Biddokkes Polda Jateng mengoperasikan enam unit ambulans motor yang dilengkapi dengan peralatan medis standar seperti kotak P3K, tensimeter, tabung oksigen portabel, alat pengukur tanda vital, dan obat-obatan dasar.

Keenam unit tersebut disebar di tiga titik berbeda untuk memperluas jangkauan pelayanan. Selain patroli rutin, ambulans motor juga disiagakan untuk penanganan bencana alam, pengamanan unjuk rasa, serta pelayanan kesehatan pada arus mudik dan balik Lebaran.

"Dengan kelincihannya, ambulans motor diharapkan mampu menjangkau lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan besar sekaligus memberikan penanganan medis darurat secara langsung di lapangan dalam waktu yang lebih singkat," tambah Agustinus.

## Patroli Kesehatan

Inovasi ambulans motor yang digagas Biddokkes Polda Jawa Tengah kini meluas hingga ke jajaran Polres.

Di Banjarnegara, tim medis dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Si Dokkes) menyusuri kawasan pasar dan titik-titik keramaian untuk memberikan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Pemeriksaan tekanan darah, konsultasi ringan, hingga pemberian vitamin dilakukan di tempat, terutama bagi pedagang dan warga lanjut usia.

"Ini menjadi solusi untuk menghadirkan layanan kesehatan yang cepat dan menyentuh langsung masyarakat," ujar PS. Kasi Dokkes Aipda Slamet Eko J., Amk.

Kegiatan serupa juga digelar Polres Jepara dengan melibatkan tenaga medis Sidokkes yang berkeliling menggunakan ambulans motor menyusuri sejumlah wilayah padat penduduk. Tim memberikan pemeriksaan tekanan darah, konsultasi, dan edukasi kesehatan ringan kepada warga.

"Kami hadir langsung di tengah masyarakat untuk memberikan



pelayanan sesuai kebutuhan mereka,” tutur Kasidokkes Penata Sri Anik mewakili Kapolres Jepara AKBP Erick Budi Santoso.

Layanan ini mendapat sambutan positif, terutama dari warga yang mengeluhkan kelelahan, pusing, dan tekanan darah tinggi.

Sementara di Grobogan, kegiatan patroli kesehatan juga dilaksanakan dengan menyusuri sejumlah wilayah Purwodadi dan area publik yang ramai.

Tim medis yang dipimpin Ps. Kasi Dokkes Aiptu Gunarni membawa perlengkapan medis ringan dan obat-obatan dasar untuk melayani masyarakat secara langsung.

Menurut Gunarni, ambulans motor menjadi bentuk pelayanan yang fleksibel dan responsif, mampu menjangkau area yang sulit dilalui kendaraan besar atau jauh dari fasilitas kesehatan.

Selain memberikan layanan medis, tim juga menyampaikan pesan-pesan hidup sehat seperti menjaga pola makan dan beristirahat cukup. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa inovasi ambulans motor merupakan bagian dari semangat Polri Presisi, terutama dalam transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Ambulans motor bukan sekadar kendaraan, tetapi simbol kepedulian Polri terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat,” ungkapnya.

Melalui inovasi ini, Polri membuktikan diri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penjaga kehidupan. Polisi hadir di jalan, di pasar, dan di tengah masyarakat yang membutuhkan pertolongan cepat dan tulus.

Biddokkes Polda Jateng dan seluruh jajaran terus meneguhkan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang cepat, responsif, dan humanis sejalan dengan semangat Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. [\*]





*Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri menunjukkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjaga kualitas Makan Bergizi Gratis bagi anak bangsa.*

# SATUAN PELAYANAN PEMENUHAN GIZI POLRI Pejaten

## SPPG Polri Jadi Model Nasional Pengelolaan Makan Bergizi Gratis





**P**rogram Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri kini menjadi sorotan positif di tengah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah. Standar tinggi dan sistem pengawasan berlapis yang diterapkan membuat dapur SPPG Polri dinilai sebagai model ideal pengelolaan pangan aman dan bergizi di Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan seluruh dapur SPPG di Indonesia nantinya akan dilengkapi alat rapid test untuk mencegah

kasus keracunan makanan. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden agar seluruh dapur MBG di berbagai daerah menerapkan sistem keamanan pangan seperti yang sudah dijalankan Polri.

“Pertama, seluruh bangunan yang dibangun oleh Polri itu kan standarnya bagus ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan rapid test sebelum makanan itu diedarkan,” ujar Dadan Hindayana di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

“Instruksi presiden bahwa seluruhnya nanti akan melakukan seperti itu,” tambahnya.

Dadan menilai, Polri telah menunjukkan bagaimana disiplin dan sistem pengawasan menyeluruh mampu mencegah kemungkinan terjadinya masalah pada kualitas makanan sejak awal. Polri disebut telah menjalankan tata kelola pangan yang tidak hanya memenuhi unsur gizi seimbang, tetapi juga menjamin keamanan konsumsi bagi penerima manfaat.



### Rapid Test Berlapis

Sebagai bentuk pengawasan keamanan pangan, SPPG Polri telah menerapkan rapid test berlapis sejak awal berdirinya dapur. Tim media yang berkunjung ke SPPG Polri Pejaten, Jakarta Selatan, menggambarkan kondisi dapur yang bersih, higienis, dan terkelola modern.

Ketua Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas MBG Mabes Polri Brigjen dr Nyoman Edy menjelaskan, rapid test dilakukan melalui dua tahap utama sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah penerima manfaat.

“Yang pertama metode organoleptik, yaitu melihat, mencium, dan menyentuh makanan untuk menilai bau, tekstur, dan rasa. Setelah dipastikan aman, baru dilakukan tahap kedua menggunakan reagen dengan alat rapid test,” jelas Nyoman.

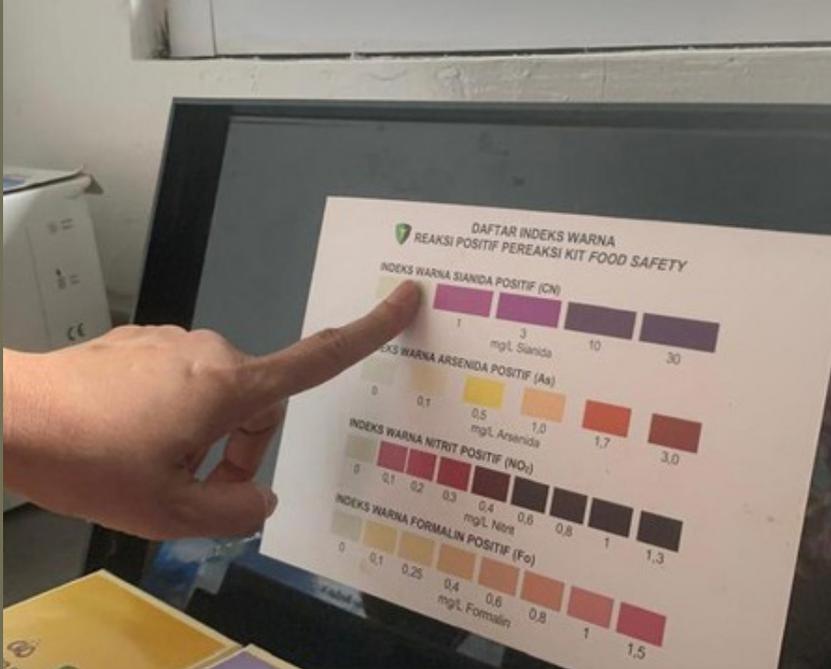
Menurutnya, pemeriksaan ini dilakukan mulai pukul 05.30 WIB setiap pagi untuk memastikan seluruh menu aman dikonsumsi. Rapid test dilakukan terhadap setiap item makanan menggunakan sampel 10–20 gram sebelum distribusi.

Anggota Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas

MBG Mabes Polri drg Tetty Seppriyanti menambahkan, rapid test yang digunakan di SPPG Polri termasuk food safety kit dengan empat jenis reagen: arsen, sianida, nitrit, dan formalin.

“Sampel makanan dihancurkan lalu dicampur air dan reagen di tabung reaksi. Perubahan warna menjadi indikator kandungan zat berbahaya. Misalnya, ungu pekat menunjukkan sianida positif, sementara oranye pada uji arsen berarti makanan tidak layak konsumsi,” terang Tetty.

Proses rapid test membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk arsen



dan 10 menit untuk reagen lainnya. Sistem ini dinilai efektif mencegah kontaminasi sejak tahap awal pengolahan.

#### Sanitasi Ketat

Keberhasilan 600 SPPG Polri dalam menjalankan program MBG tidak terlepas dari pengelolaan dapur yang modern dan higienis. Setiap bahan baku seperti sayur, buah, hingga daging disortir dan dicuci dengan prosedur ketat sebelum diolah.

Peralatan masak melewati sanitasi tiga tahap dan pengeringan oven untuk memastikan kebersihan maksimal.

Kepala SPPG Polri Pejaten, Iqbal Salim, menegaskan bahwa standar sanitasi menjadi prioritas utama. Setiap tahap produksi diawasi langsung oleh petugas kesehatan melalui inspeksi rutin, dan seluruh dapur telah memiliki sertifikasi ISO 2018, HACCP, GMP, BRC, serta sertifikat halal.

Penerapan standar tersebut memastikan makanan yang disajikan higienis, bergizi, dan layak konsumsi.

Selain itu, SPPG Polri juga memperhatikan kenyamanan penerima manfaat dengan menyediakan angket menu mingguan yang memberi



kesempatan siswa memilih menu favorit mereka tanpa mengurangi keseimbangan gizi.

#### Apresiasi DPR

Langkah Polri dalam menjaga standar MBG mendapat apresiasi luas dari kalangan legislatif. Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman menilai disiplin dan tata kelola dapur SPPG Polri menunjukkan bagaimana pengawasan menyeluruh mampu menjaga mutu makanan sejak proses awal.

"Setiap makanan melalui dua tahap rapid test, cek bau, rasa, tekstur, dan penggunaan reagen. Sehingga potensi kerusakan dapat terdeteksi lebih awal," ujar Habiburrahman.

Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. Menurutnya, kehadiran SPPG Polri menjadi contoh nyata penerapan tanggung jawab dan konsistensi dalam keamanan pangan.

"Saya punya informasi kalau Polri itu punya 600 SPPG. Informasi yang masuk ke saya, semuanya berjalan sesuai SOP, tidak pernah ada kasus keracunan atau masalah lain. Ini bukti nyata bahwa pengelolaan yang baik bisa dilakukan siapa saja asal bertanggung jawab," kata Irma.

Legislator NasDem ini menilai, dengan tata kelola yang baik dan disiplin tinggi, SPPG Polri layak dijadikan model bagi seluruh dapur MBG di Indonesia.

Dengan penerapan rapid test berlapis, sanitasi ketat, serta sertifikasi keamanan pangan internasional, SPPG Polri membuktikan bahwa disiplin dan tanggung jawab institusional mampu menjadi tolok ukur nasional dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

Apresiasi dari BGN, DPR, dan masyarakat menjadi bukti bahwa Polri bukan hanya menjaga keamanan bangsa, tetapi juga turut memperkuat ketahanan gizi generasi penerus. [\*]

**B****UNGA RAMPAI**

**POLRI LEPAS**  
**1.765 Ton**  
**Jagung untuk Bulog**

*Bukan sekadar panen raya biasa, momentum itu menandai peran Polri mendampingi petani dalam proses tanam hingga memastikan hasil panen terserap pasar.*

Suasana pagi di depan sebuah ladang jagung di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kali ini terasa berbeda. Di tepian ladang, truk-truk pengangkut berton-ton jagung hasil panen berjejer rapi menunggu giliran diberangkatkan menuju lokasi distribusi.

Pada akhir September itu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menjadi pusat panen raya jagung serentak kuartal III tahun 2025. Dari lokasi itu pula, seremoni pelepasan ribuan ton jagung yang dikelola Polri menuju gudang Perum Bulog dimulai.

Panggung sederhana yang berdiri di dekat ladang menjadi latar ketika Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir bersama jajaran pejabat pemerintah, mulai dari Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Menko Pangan RI Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Bulog RI Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, hingga Pimpinan Wilayah Bulog Sumsel Babel Mersi Windrayani. Kapolri juga didampingi oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda Sumatra Selatan.

Bukan sekadar panen raya biasa, momentum di Ogan Komering Ulu Timur itu menandai peran ganda Polri: mendampingi petani dalam proses tanam hingga memastikan hasil panen terserap oleh pasar. Melalui pelepasan distribusi ini, jagung hasil panen tak hanya memenuhi kebutuhan lokal, melainkan juga masuk ke cadangan pangan nasional yang dikelola Perum Bulog.

"Hari ini, kita akan memberangkatkan sebanyak 1.765 ton jagung untuk diserap Bulog," kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo



## BUNGA RAMPAI

Sigit Prabowo saat memberikan sambutan dalam kegiatan panen raya jagung serentak kuartal III.

Pendistribusian hasil panen jagung menuju gudang Perum Bulog ini menjadi bukti nyata sinergi antara kepolisian, petani, dan pemerintah dalam membantu mewujudkan swasembada pangan nasional yang sekaligus menjadi bagian dari program Asta Cita Kabinet Merah Putih.

Melalui penyerapan hasil panen menuju gudang resmi, Kapolri meyakini langkah ini tidak hanya sekadar memberi kepastian bagi petani dalam menjual

hasil panennya, melainkan juga menjamin ketersediaan stok pangan bagi masyarakat secara luas—baik untuk industri maupun konsumsi. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh dua pihak sekaligus: petani yang terlindungi dari fluktuasi harga pasar serta masyarakat yang memperoleh akses pangan dengan harga stabil.

“Oleh karena itu, kami terus berupaya mewujudkan hal tersebut dengan dukungan penuh dari kementerian terkait, kemudian juga mitra-mitra strategis, masyarakat, dan gapoktan,” jelas Kapolri.

*“Oleh karena itu, kami terus berupaya mewujudkan hal tersebut dengan dukungan penuh dari kementerian terkait, kemudian juga mitra-mitra strategis, masyarakat, dan gapoktan,”*





Hingga pekan ketiga September 2025, Bulog telah menyerap 76,9 ribu ton jagung produksi dalam negeri, sementara stok yang tersimpan mencapai 72 ribu ton. Penyerapan ini menjadi bukti nyata kerja sama antara petani, Polri, pemerintah, dan Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

Secara keseluruhan, estimasi panen raya jagung serentak yang dikelola oleh Polri pada kuartal III 2025 mencatat hasil yang signifikan. Dari luas lahan 166.512 hektare yang dikelola Polri, produksi jagung mencapai sekitar 751.422

ton. Capaian ini melanjutkan keberhasilan panen pada kuartal I dan II, di mana jagung telah dipanen dari lahan seluas 360.019 hektare dengan total produksi mencapai 2.083.740 ton jagung.

Kapolri juga menjelaskan bahwa hingga 27 September 2025, total luas lahan yang dikelola Polri untuk program ketahanan pangan nasional tercatat mencapai 819.080 hektare. Dari jumlah itu, sekitar 483.822 hektare telah ditanami. Lahan yang belum ditanami terus dipersiapkan secara bertahap melalui pendampingan teknis dan penyediaan bibit unggul,

sehingga setiap tahap dari proses tanam hingga panen dapat berjalan optimal.

Dengan luas lahan yang terus dikelola dan ditanami secara bertahap, program ketahanan pangan ini menegaskan konsistensi serta keberlanjutan langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Di balik angka tonase dan hektare lahan, yang terpenting adalah manfaat nyata yang dirasakan: petani terlindungi dari fluktuasi harga, masyarakat memperoleh pangan dengan harga stabil, dan cadangan pangan nasional terus diperkuat. [\*]



# Gerakan Pangan Murah, Wujud Kepedulian Polri untuk Ketahanan Pangan

Sebagai wujud dukungan terhadap program pemerintah di bidang ketahanan pangan, Polri kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Kegiatan ini dipusatkan di Slog Polri, Jakarta Timur, dengan menyediakan 50 ton beras SPHP atau setara 10.000 kantong yang disalurkan langsung kepada masyarakat.

Selain beras, turut disiapkan 5.000 pouch minyak goreng kemasan 1 liter dan 5.000 kantong terigu 1 kilogram, seluruhnya hasil kerja sama antara Polri dan Bulog.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, harga bahan pokok dijual di bawah harga pasar agar masyarakat dapat menjangkau kebutuhan harian dengan lebih mudah.

“Melalui pasar murah ini ada beberapa paket yang dapat dibeli. Beras seharga Rp11 ribu per kilogram, minyak goreng Rp20 ribu per liter, dan gula pasir Rp10 ribu per kilogram,” ujar Brigjen Trunoyudo, Rabu (17/9/2025).

Selain di Slog Polri, kegiatan serupa juga digelar di Polres Metro Jakarta Timur dengan menyediakan 25 ton beras, 2.500 pouch minyak, dan 2.500 kantong gula. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, terlihat dari panjangnya antrian warga yang datang sejak pagi.

Menurut Brigjen Trunoyudo, pelaksanaan GPM akan terus diperluas ke berbagai wilayah dengan jumlah yang semakin besar. Polri juga tengah menyiapkan sistem distribusi yang lebih efisien dan ramah masyarakat.



“Tentu kita akan buat metode-metode yang lebih mudah, seperti drive-thru untuk pengemudi ojol, Grab, dan lainnya, agar pelayanan semakin cepat, luas, dan manfaatnya langsung diterima masyarakat,” jelasnya.

Dukungan terhadap GPM juga mengalir hingga ke daerah. Polda Kalimantan Tengah (Polda Kalteng) dan jajaran polresnya menyalurkan 17.825 kilogram beras SPHP dalam program Gerakan Pangan Murah Serentak yang digelar di seluruh wilayah provinsi, Rabu (8/10/2025).

Polda Kalteng semula menargetkan penyaluran 15 ton beras dalam sehari. Namun, berkat kegigihan dan kerja keras personel di lapangan, jumlah tersebut berhasil dilampaui.

“Program Gerakan Pangan Murah ini dilaksanakan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan guna membantu masyarakat mendapatkan beras murah namun berkualitas baik,” jelas Dirbinmas Polda Kalteng Kombes Pol. Budhi Rochmat, S.I.K., mewakili Kapolda Kalteng Irjen Pol. Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si.

Sementara itu, Polda Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Direktorat Binmas menggelar program serupa di dua lokasi berbeda secara serentak, Jumat (10/10/2025).

Kegiatan yang menjadi bagian dari program Jumat Berkah ini digelar di Masjid Taqwa Al-Falah, Pasar VII Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Bekerja sama dengan Bulog, Polri menyalurkan 1.200 karung atau sekitar 6 ton beras SPHP, yang dijual dengan harga Rp58.000 per karung (5 kg). Sejak pagi, warga sudah memadati lokasi dan membeli secara tertib hingga seluruh stok ludes terjual.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat, dengan menyalurkan 1.000 karung atau 5 ton beras SPHP, yang habis terjual hanya dalam beberapa jam.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Ferry Walintukan menegaskan, kegiatan ini bukan semata soal menekan harga bahan pokok, tetapi juga mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah adalah wujud nyata Polri hadir membantu rakyat. Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri bukan hanya penegak hukum, tetapi juga mitra dan sahabat dalam kehidupan sehari-hari,” kata Kombes Ferry.

Melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, Polri menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Gerakan ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan dan rasa aman adalah dua sisi dari kepedulian yang sama: memastikan kesejahteraan masyarakat Indonesia. [\*]

# Polisi, Harapan, Realitas, dan Jalan Kembali ke Misi Mulia

*Arief Sulistyanto*

*Mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri*



*Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling lama menjabat,  
tetapi siapa yang paling berani memperbaiki.*

**G**elombang tuntutan masyarakat agar kepolisian direformasi semakin kuat. Publik menagih kembalinya polisi pada jalan pengabdian yang sejati: menghadirkan rasa aman, menegakkan keadilan, dan melayani dengan sepenuh hati.

Suara ini bukan sekadar kritik sesaat, melainkan cermin dari krisis kepercayaan yang kian dalam. Semestinya, inilah momentum emas untuk melakukan pembenahan institusi secara holistik -menyentuh sistem, budaya, hingga kepemimpinan- bukan sekadar tambal sulam struktural.

Namun, alih-alih dijadikan bahan introspeksi, fenomena yang muncul justru mengherankan. Di tengah derasnya aspirasi reformasi, ada “elemen masyarakat” yang digerakkan untuk menolak perubahan dan mendukung status quo.

Fenomena ini menjadi antitesis dari semangat pembenahan. Bagaimana mungkin suara murni publik yang menghendaki perbaikan direspons dengan gerakan tandingan yang mempertahankan kondisi karut-marut?

## **Keteladanan yang Dirindukan**

Pada masa awal kemerdekaan, polisi hadir sebagai pengayom sejati. Mereka dikenal karena kedekatannya dengan masyarakat, bukan karena atribut atau pangkat. Polisi tidak hanya menjaga keamanan, tetapi menjaga kepercayaan.

Wibawa institusi lahir dari sikap rendah hati, keberanian menegakkan keadilan, dan ketegasan terhadap penyimpangan—bahkan terhadap dirinya sendiri. Kehormatan Bhayangkara kala itu tumbuh dari nilai, bukan citra. Dari pengabdian, bukan tuntutan jabatan.

Kini, meski sarana semakin canggih, struktur kelembagaan kian besar, dan jargon modernisasi bertebaran, yang merosot justru kepercayaan publik. Masyarakat kian sering melihat polisi lebih dekat dengan lingkaran kekuasaan ketimbang dengan denyut hati mereka sendiri.

Tingginya keluhan masyarakat atas kinerja pelayanan dan pemenuhan rasa keadilan yang tidak maksimal semakin menumpuk, hingga melahirkan sarkasme pahit di ruang publik: "no viral, no justice".

### Ilusi Reformasi

Reformasi Polri pasca-1998 sejatinya lahir dari harapan besar. Namun, yang bergerak cepat justru perubahan struktural

dan instrumental: gedung baru, teknologi digital, seragam yang diperbarui. Sementara itu, reformasi mendasar -kultural, pembenahan mental, orientasi nilai, dan karakter personel- masih terabaikan.

Padaahal, di situlah inti perubahan yang paling mendesak: manusia dan budaya kerja.

Ketika masyarakat mendengar kata "oknum" berulang kali, mereka tidak lagi melihat individu, melainkan pola. Dan pola itulah yang menjadi cermin sistem. Maka, tidak heran apabila seruan reformasi kini kian lantang.

Tetapi, apa jadinya jika aspirasi itu ditanggapi dengan gerakan tandingan, seolah-olah reformasi adalah ancaman? Itu adalah sikap "lupa diri" yang justru memperdalam jurang ketidakpercayaan.

Reformasi sejati harus kembali pada tiga dimensi mendasar: sistem, budaya, dan kepemimpinan.

Pertama, sistem. Rekrutmen, promosi, dan pengawasan harus bersih, merit, bukan kedekatan. Institusi harus bersih dari dalam sebelum membersihkan di luar.

Kedua, budaya. Budaya integritas harus dihidupkan kembali melalui teladan, bukan sekadar slogan. Budaya melanggar dan bangga pada kelicikan harus diganti dengan kejujuran yang harus menjadi arus utama.

Ketiga, kepemimpinan. Pemimpin sejati tidak populer sesaat, tetapi jangka panjang. Mereka berani berdiri di depan membela kebenaran, bukan sekadar piawai tampil di panggung.

Rakyat Indonesia tidak menuntut polisi yang sempurna. Mereka hanya ingin polisi yang adil, jujur, dan berpihak kepada yang lemah. Polisi yang hadir saat dibutuhkan, bukan hanya ketika kamera merekam.

Kini, pertanyaan mendasar masih menggantung: apakah Polri berani menempuh jalan lurus reformasi atau justru berjalan dalam arak-arakan massa yang mempertahankan status quo?

Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling lama menjabat, tetapi siapa yang paling berani memperbaiki.

Semoga Allah meridai langkah-langkah suci mereka yang ingin mengoreksi dan yang lupa diri agar segera kembali ke jalan yang benar.

*Artikel ini sudah dimuat di Harian Kompas Edisi 18 September 2025*



# Peristiwa Minggu Palma,

## Ketika Brimob Diuji di Bobonaro



*Pertempuran di Bobonaro yang disebut sebagai Tragedi Minggu Palma mengubah doktrin dan marwah Pasukan Brimob.*

Udara pagi di perbukitan Bobonaro, 11 April 1976, terasa kering; debu halus berputar di udara panas yang menyesakkan. Dari atas bukit, tampak barisan Bhayangkara berseragam hijau rimba, senapan tergendong, mata awas menyapu lembah. Di bawah, lonceng gereja berdentang pelan hari itu Minggu Palma, hari suci bagi umat Katolik.

Dalam suasana tenang itu, Batalyon Teratai Brimob Polri siaga di sektor depan Operasi Seroja. Mereka datang dengan misi pengamanan wilayah, bukan untuk perang besar. Namun pagi yang teduh itu akan berubah menjadi peristiwa paling pahit dalam sejarah Korps Bhayangkara khususnya Brimob.

Beberapa jam setelah fajar, pos pengamatan Brimob melaporkan pergerakan mencurigakan dari arah perbukitan. Tak lama kemudian, suara tembakan pertama terdengar. Rentetan senjata otomatis segera membelah udara, menandai pecahnya kontak senjata di Bobonaro.

Pasukan Brimob membalas, mencari perlindungan di balik batu karang dan parit kering. Kompi A yang berada di garis depan bertahan hingga peluru terakhir, namun jumlah musuh yang jauh lebih besar membuat posisi mereka terdesak. Kompi B kehilangan kontak radio, sementara Kompi C di sisi selatan mencoba menutup celah pertahanan dengan amunisi yang tersisa.

Dari arah barat daya, pasukan Marinir yang menempati posisi berdekatan melihat kepulan asap dan mendengar rentetan senjata dari perbukitan tempat Brimob bertahan. Komunikasi radio yang semula tenang mendadak ramai, menandakan

kontak tembak telah pecah. Dari posisi mereka, pertempuran tampak berlangsung tidak seimbang: pasukan Brimob berada di area terbuka, sementara musuh menyerang dari lembah dengan perlindungan batu dan semak. Kondisi medan membuat koordinasi antarsatuan sulit dilakukan.

Pertempuran berlangsung hingga sore. Amunisi menipis, posisi terbuka, dan senapan AR-15 yang digunakan sebagian besar personel macet karena debu panas.

Dalam situasi itulah Komandan Batalyon, AKBP Ibnu Hadjar Adhikara, menilai bahwa bertahan lebih lama hanya akan mengorbankan seluruh pasukan.





“Bertahan tanpa amunisi sama saja mati konyol,” kata dia dalam sebuah wawancara 26 Maret 2012. “Saya tidak mau anak-anak itu mati sia-sia. Mereka sudah berjuang sejauh mungkin.”

Ia kemudian mengambil keputusan paling berat dalam karier militernya: mundur taktis.

“Mundur bukan berarti kalah. Itu keputusan untuk menyelamatkan pasukan. Semua senjata tetap dibawa, tidak ada yang dibuang,” tegasnya.

### Perubahan Perintah di Tengah Laut

Belakangan, langkah itu sempat menimbulkan salah tafsir dan berkembang menjadi rumor bahwa pasukan Brimob melarikan diri dari pertempuran dengan dan membuang senjatanya. Namun hasil penyelidikan internal Polri dan keterangan resmi menunjukkan sebaliknya: tidak ada senjata yang ditinggalkan, dan seluruh pasukan berhasil ditarik dengan tertib ke garis belakang.

Batalyon Teratai bukan satuan tempur tetap. Ia dibentuk secara mendadak, hanya dalam tiga hari di Mako Brimob Kelapa Dua atas perintah lisan untuk memperkuat operasi di Timor Timur. Banyak pihak keliru menyamakan satuan ini dengan Resimen Pelopor, padahal Resimen Pelopor telah dibubarkan pada 1969–1970.

“Batalyon Teratai bukan lagi Resimen Pelopor,” ujar Ibnu Hadjar. “Kami hanya mengumpulkan anggota lama yang pernah menjadi Pelopor, ditambah lulusan SPN dan Sabhara. Semua serba cepat, tanpa latihan tempur.”

Pasukan ini terdiri atas sekitar 300 personel yang dibagi menjadi tiga kompi utama dan satu kompi staf. Hanya sepertiganya pernah memiliki kualifikasi Pelopor; sisanya adalah anggota Brimob baru dari berbagai satuan kepolisian. Mereka dipersenjatai dengan AR-15 dengan amunisi terbatas, tanpa granat,

tanpa kompas, bahkan tanpa radio komunikasi antar-kompi.

“Kami hanya punya peta tanpa kompas. “Koordinasi jadi sangat sulit begitu kontak tembak terjadi,” kenang Ibnu Hadjar

Awalnya, Batalyon Teratai hanya ditugaskan untuk misi kepolisian di daerah konflik. Namun di tengah perjalanan menuju Dili, datang perintah baru dari Komando Gabungan (Kogasgab): mereka harus menjadi batalyon penyekat untuk menutup gerak mundur pasukan Fretilin di Bobonaro.



"Awalnya kami diberi perintah untuk tugas polisi di daerah konflik, bukan tempur. Tapi saat di kapal, datang perintah baru agar Yon Teratai menjadi batalyon penyekat pasukan Fretilin. Jadi perubahan terjadi mendadak, di tengah laut. Pembagian sektor baru kami lakukan di atas kapal," tutur Ibnu Hadjar.

Perubahan mendadak itu membuat pasukan belum sempat menyesuaikan diri. Dengan kekuatan yang terbatas dan persiapan yang minim, Yon Teratai harus menempati sektor yang luas dengan medan berat dan terputus dari dukungan komunikasi. Kondisi tersebut sejak awal menjadikan posisi Brimob di Bobonaro tidak ideal untuk pertempuran frontal.

### Keputusan yang Berat

Ketika seluruh sektor mulai terdesak, Ibnu Hadjar memerintahkan penarikan mundur secara teratur. Ia memastikan tak satu pun senjata ditinggalkan. "Kalau bertahan tanpa peluru, itu bukan keberanian, itu bunuh diri. Tugas saya menjaga nyawa anak buah, bukan mengorbankan mereka demi kebanggaan," kata dia.

Setelah operasi usai, Ibnu Hadjar bertanggung jawab penuh. Dalam laporannya kepada Mabes Polri, ia menyatakan siap menanggung semua konsekuensi keputusan di lapangan. Meski sempat diminta tetap berdinam, ia kemudian mengajukan pensiun dengan hormat beberapa tahun kemudian saat menjabat Waka Denma Mabes Polri.

Surat keputusan pensiunnya ditandatangani langsung oleh

Presiden Soeharto, sebagai bentuk penghargaan atas integritas dan sikap tanggung jawabnya.

Tragedi Minggu Palma menjadi pelajaran besar bagi Polri. Dari peristiwa itu lahir kesadaran baru: bahwa keberanian saja tidak cukup. Sebuah pasukan harus ditopang oleh kesiapan, logistik, dan sistem komando yang solid.

Bertahun-tahun kemudian, para instruktur generasi awal di Pusat Pendidikan Brimob di Watukosek, Jawa Timur menjadikan peristiwa Bobonaro sebagai refleksi doktrin, menegaskan bahwa keberanian tanpa kesiapan hanyalah pengorbanan sia-sia. Refleksi itulah yang melahirkan pembaruan dalam sistem pelatihan Brimob: penekanan pada kesiapan mental, koordinasi satuan, dan tanggung jawab komando. [\*]



# Polisi Pelestari Tradisi Andong Wisata Purwodadi

*Berawal dari hobi menunggang kuda, kegiatan itu berkembang menjadi usaha wisata kecil yang kini dikenal sebagai Wisata Andong Purwodadi.*



**D**i tengah derasnya modernisasi yang membuat tradisi perlahan memudar, masih ada sosok yang menjaga warisan lokal dengan cara sederhana namun bermakna. Ia adalah Aiptu Biyanto, anggota Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah, yang sehari-hari bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Desa Mbolo, Polsek Toroh.

Saat mengenakan seragam cokelat, ia dikenal sebagai polisi yang dekat dengan warga. Namun di waktu luangnya, Biyanto menukar helm dinas dengan blangkon dan tali kekang kuda menjadi kusir andong wisata di kawasan Alun-Alun Purwodadi.

Kecintaannya pada dunia kuda bukan hal baru. Sejak kecil, ia tumbuh di keluarga sederhana; ayahnya bekerja sebagai penarik delman. "Hidup saya sejak kecil tidak pernah jauh dari kuda," ujarnya membuka cerita. Warisan itu tidak berhenti di dirinya saja.

Anak pertamanya, Abi Nidia Irawati, kini mengikuti jejak pengabdian sang ayah dengan menjadi anggota Polri. "Alhamdulillah, jejak pengabdian saya di kepolisian diikuti anak saya yang pertama, Abi Nidia Irawati, yang masuk lewat jalur rekrutmen dan selama tiga tahun berturut-turut mendapatkan medali emas," ucapnya bangga.

“Alhamdulillah, doa almarhum bapak sudah terkabul. Saya jadi polisi, tapi tetap tidak meninggalkan dunia kuda.”

Berawal dari hobi menunggang kuda, kegiatan itu berkembang menjadi usaha wisata kecil yang kini dikenal sebagai Wisata Andong Purwodadi. Setiap akhir pekan atau ketika tidak sedang berdinis, ia mengajak rekannya mengelilingi alun-alun membawa penumpang menikmati suasana kota.

### Menjaga Tradisi

Memelihara tiga ekor kuda betina untuk armadanya, Biyanto ikut membentuk paguyuban andong yang kini beranggotakan sekitar lima puluh kusir. Ia tak hanya ingin

menjaga tradisi, tetapi juga menghidupkan kembali budaya yang hampir punah. “Di Grobogan, andong sudah semakin jarang, tapi budaya tidak boleh hilang,” ujarnya.

Paguyuban itu tidak hanya melayani wisata, tetapi juga ikut meramaikan berbagai kegiatan masyarakat seperti sunatan, pernikahan, kirab, hingga hari jadi daerah.

Dalam keseharian tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas, Biyanto kerap menjadi tempat warga mencari solusi atas persoalan sosial. Ia memilih cara kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah, seperti perkelahian, pencurian ringan, hingga KDRT.

“Sebagai Bhabinkamtibmas saya sering menangani permasalahan perkelahian,



pencurian ringan, ataupun KDRT dengan cara kekeluargaan, karena keamanan lahir dari kebersamaan,” jelasnya.

Pendekatan humanis itu membuatnya dihormati warga. Banyak yang datang bukan karena masalah hukum, melainkan untuk berbagi cerita atau meminta saran. Bagi Biyanto, menjadi polisi berarti hadir di tengah masyarakat, mendengarkan, dan ikut menjaga harmoni sosial.

Paguyuban yang ia pimpin juga aktif membangun solidaritas antaranggota.

“Kami rutin tiap tanggal 20 melakukan perkumpulan arisan. Di situ rekan-rekan bisa menyampaikan unek-unek, seperti pembuatan SIM anak, perpanjangan SIM atau STNK,” tuturnya.

Baginya, wadah itu bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga bentuk pelayanan dan wadah komunikasi antara masyarakat dengan kepolisian.

*“Harapan kami sederhana, mempunyai lapak untuk wisata andong agar rekan-rekan lebih tenang dan Grobogan lebih gemilang,”*





Kedekatan itu tidak hanya dengan manusia. Dalam salah satu ucapannya yang paling menyentuh, ia mengatakan, “Bagi saya, kuda bukan sekadar hewan, tapi menjadi sahabat keseharian saya.”

Delapan tahun sudah Biyanto menjalani peran sebagai kusir andong, dan ia tidak berniat berhenti. Ia berharap kelak ada lokasi khusus bagi wisata andong agar tradisi ini bisa bertahan lebih lama.

“Harapan kami sederhana, mempunyai lapak untuk wisata andong agar rekan-rekan lebih tenang dan Grobogan lebih gemilang,” ujarnya menutup.

Kisah Aiptu Biyanto menjadi cermin pengabdian yang melampaui batas profesi. Ia menunjukkan bahwa menjadi polisi bukan hanya soal menegakkan aturan, tapi juga menjaga denyut budaya dan kebersamaan. Dari jalanan hingga kandang kuda, dari seragam dinas hingga kendali andong, setiap langkahnya adalah bentuk pengabdian yang tulus kepada masyarakat dan warisan yang ia jaga dengan sepenuh hati. [\*]



Briptu Revangga:

# Dari Kandang Etawa, Lahir Ketahanan dan Harapan

*Sekalipun memiliki usaha peternakan di samping tugas utamanya sebagai anggota Polri, aktivitas beternak ini sama sekali tidak mengganggu kewajiban dinasny.*





Seragam cokelat tak selalu identik dengan ruang dinas dan patroli jalanan. Di Jepara, seorang anggota Polri menunjukkan bahwa pengabdian bisa lahir dari banyak bentuk, bahkan dari kandang ternak. Ia adalah Briptu Revangga Kristyan Dikara, Bhabinkamtibmas Polsek Bangsri, Polres Jepara, yang sukses mengelola usaha ternak kambing etawa sambil tetap menjalankan tugas kepolisian.

Usaha yang ia jalankan berawal dari hobi masa kecilnya. Sejak duduk di bangku sekolah, Briptu Revangga sudah terbiasa berinteraksi dengan hewan peliharaan. Ketika menjadi anggota Polri, kecintaan itu tidak serta-merta pudar. Justru dari situ muncul ide untuk memanfaatkan waktu di luar dinas dengan kegiatan produktif.

“Kebetulan senang dengan hewan lalu coba-coba ternak kambing etawa, dan alhamdulillah didukung keluarga,” kata Briptu Revangga.

Ia kemudian membangun kandang kambing sederhana di Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, yang dinamainya Antasena Farm. Usaha yang dimulai sejak 2016 itu kini telah membuat puluhan kambing etawa tumbuh sehat dan produktif. Di kandang seluas ratusan meter, dirinya memelihara sekitar 15 ekor indukan, satu ekor pejantan, dan 12 anakan kambing atau cempe.

Sekalipun memiliki usaha peternakan di samping tugas utamanya sebagai anggota Polri, aktivitas beternak ini sama sekali tidak mengganggu kewajiban dinasny.



“Sejauh ini tidak mengganggu tugas dinas. Karena aktivitas merawat kambing etawa itu dilakukan di luar jam dinas,” tegas Briptu Revangga.

Rutinitas itu ia jalani dengan sederhana namun teratur. Setiap pagi sebelum berangkat dinas, ia menyempatkan diri melihat kondisi kandang dan memberi pakan seadanya. Setelah selesai menjalankan tugas kepolisian, sore harinya ia kembali ke kandang untuk mencari pakan di hutan dekat rumahnya.

*“Saya percaya setiap orang harus punya kegiatan positif di luar jam kerja. Kegiatan ini juga bisa jadi contoh bagi masyarakat bahwa kita, sebagai polisi, juga bisa mandiri dan berkontribusi secara ekonomi. Saya berharap apa yang saya lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain,”*

## Didukung Keluarga

Selain dirinya, sang istri, ayah, dan adiknya ikut membantu kegiatan peternakan. Mereka menyiapkan pakan, membersihkan kandang, serta memantau kondisi kesehatan hewan. Dukungan keluarga menjadi faktor utama keberhasilan usaha yang dijalani Briptu Revangga.

Briptu Revangga tak hanya memandang kambing etawa sebagai hewan peliharaan, melainkan juga sebagai sumber manfaat yang luas. Dari satu

kandang, lahir beragam peluang. Kambing jantan yang ia pelihara berpotensi diikutkan dalam kontes, sementara kambing betina menghasilkan susu bernilai gizi tinggi yang bisa dipasarkan ke masyarakat. Anak kambing atau cempu pun menjadi aset berharga karena selalu memiliki peminat. Bahkan kotoran kambingnya diolah menjadi pupuk organik yang laris dibeli para petani di sekitar desa.

Dari hasil ternak itu, perlahan Briptu Revangga merasakan manfaat nyata. Keuntungan



yang diperoleh mampu ia tabung hingga bisa membangun rumah, membeli mobil, dan memperbesar usaha. Dana yang berputar dari hasil ternak juga terus menambah modal. Sebagian hasil penjualan ia investasikan kembali untuk membeli lahan dan memperluas kandang.

Bagi Briptu Revangga, beternak bukan sekadar mencari keuntungan. Melalui usaha ternaknya, ia menjadikan Antasena Farm sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Ia aktif melibatkan warga sekitar untuk ikut terlibat dalam kegiatan peternakan. Dengan cara ini, Antasena Farm bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh manfaat bersama.

Semangat beternak yang ditunjukkan oleh Briptu Revangga sejalan dengan komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Ia menjadi salah satu wajah muda yang menampilkan sisi lain dari pengabdian aparat kepolisian—produktif, inovatif, dan dekat dengan masyarakat.

“Saya percaya setiap orang harus punya kegiatan positif di luar jam kerja. Kegiatan ini juga bisa jadi contoh bagi masyarakat bahwa kita, sebagai polisi, juga bisa mandiri dan berkontribusi secara ekonomi. Saya berharap apa yang saya lakukan ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain,” jelas Briptu Revangga.

Kisah Briptu Revangga Kristyan Dikara membuktikan bahwa pengabdian tidak selalu diukur dari pangkat atau jabatan. Di tengah kesibukan tugas menjaga keamanan, ia tetap menyisihkan waktu untuk menumbuhkan kehidupan secara harfiah. Dari tangan seorang polisi muda, kambing-kambing etawa itu tumbuh sehat, dan dari semangatnya, lahir inspirasi baru tentang arti pengabdian yang sesungguhnya. [\*]



# Aipda Yeskiel Hadjo: Menyalakan Harapan dari Pedalaman



*Anak putus sekolah dan warga dewasa yang belum menuntaskan pendidikan dasar mendorongnya berbuat sesuatu, dimulai dari hal sederhana.*

**S**ore di Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, berjalan pelan di antara barisan jagung dan sayur hijau yang tumbuh rapi. Di sela hamparan ladang, tampak seorang polisi berseragam cokelat mengenakan caping, tangannya memegang cangkul sambil memeriksa bedengan tanaman. Dialah Aipda Yeskiel Hadjo, Bhabinkamtibmas Polsek Kualin, sosok yang menjadikan lahan pertanian sebagai ruang pengabdian dan pendidikan bagi masyarakat di pedalaman.

Kecamatan Kualin terletak di bagian selatan Kabupaten TTS, berbatasan langsung dengan pesisir selatan Pulau Timor. Wilayah ini didominasi perbukitan batu kapur dengan jalan berbatu yang sulit dilalui kendaraan. Di musim hujan, akses menuju desa-desa





terputus oleh sungai yang meluap. Dalam kondisi seperti itu, Yeskiel menjalankan tugasnya sebagai Bhabinkamtibmas, menjangkau warga satu per satu, kadang dengan berjalan kaki, kadang menuntun sepeda motor melewati jalan berlumpur.

Sejak bertugas di Kualin pada 2009, Yeskiel menyaksikan banyak anak putus sekolah dan warga dewasa yang belum menuntaskan pendidikan dasar. Kondisi itu mendorongnya untuk berbuat sesuatu, dimulai dari hal sederhana.

Ia membuka kelas belajar Bahasa Inggris gratis di rumah dinas, menggunakan papan tulis kecil dan beberapa buku pinjaman dari sekolah terdekat. "Banyak anak ingin belajar, tetapi tidak mampu membayar les di kota," ujarnya. "Saya ingin mereka percaya diri dan memiliki semangat belajar."

Kegiatan itu berkembang pesat. Dari empat murid di awal, kini puluhan anak mengikuti pelajaran rutin setiap sore. Suasana belajar berlangsung hangat; anak-anak duduk di kursi plastik, menulis di pangkuan,

sementara Yeskiel mengajar sambil tersenyum. “Kalau mereka semangat, capek sehari pun hilang,” katanya.

Untuk membantu warga yang tidak lagi duduk di bangku sekolah, Yeskiel mendirikan PKBM Galatya (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) pada 2023. Dengan fasilitas sederhana, PKBM ini menampung warga belajar program Paket A, B, dan C. Teras rumahnya disulap menjadi ruang kelas, dilengkapi papan tulis, meja kayu, dan rak buku hasil sumbangan masyarakat.

Kini PKBM Galatya menjadi tempat belajar bagi warga dari berbagai usia. Ada remaja yang gagal melanjutkan sekolah karena jarak, ada pula orang tua yang baru belajar membaca di usia senja.

Pada Agustus 2025, sebanyak 151 peserta didik PKBM Galatya menerima ijazah dalam acara kelulusan yang dihadiri Kapolres TTS AKBP Hendra Dorizen. Kegiatan tersebut menjadi simbol keberhasilan pendidikan nonformal yang tumbuh dari inisiatif masyarakat dan didampingi anggota Polri di lapangan.

“Kalau bukan Pak Yeskiel, mungkin anak-anak kami tak pernah pegang ijazah,” tutur seorang warga Meotban dengan mata berbinar.

## Apresiasi Pimpinan

Atas dedikasi dan inovasinya, Aipda Yeskiel Hadjo menerima penghargaan langsung dari Kapolres TTS AKBP Hendra Dorizen. Penghargaan diserahkan dalam apel di halaman Mapolres TTS pada Senin, 6 Oktober 2025, bersama sejumlah anggota berprestasi lainnya.

Kapolres menyebut Yeskiel sebagai contoh nyata penerapan Polri Presisi di lapangan. “Ia menghadirkan wajah kepolisian yang humanis, mampu berinovasi, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar AKBP Hendra Dorizen dalam sambutannya.

Ia menambahkan, kiprah Yeskiel menjadi teladan bahwa pengabdian polisi tidak berhenti pada tugas keamanan semata, tetapi juga mencakup pemberdayaan dan pembangunan sosial di tingkat desa. Polres TTS kini menjadikan PKBM Galatya sebagai model program pemberdayaan masyarakat berbasis kepolisian yang dapat direplikasi di wilayah lain.





### Menumbuhkan Kemandirian

Selain di bidang pendidikan, Aipda Yeskiel juga menggerakkan kegiatan pertanian dan usaha tenun ikat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi warga. Bersama masyarakat, ia menggarap lahan di sekitar rumahnya untuk menanam jagung, sayuran, dan kacang tanah. Air irigasi dialirkan dari sumber sejauh delapan kilometer menggunakan pipa sederhana yang dibuat secara swadaya.

Panen pertama dibagikan kepada warga sekitar, sedangkan hasil berikutnya dijual dan keuntungannya digunakan membeli perlengkapan sekolah bagi anak-anak PKBM. Ia juga membina kelompok ibu rumah tangga agar dapat menghasilkan tenun ikat khas Kualin yang kini mulai dipasarkan hingga Soe dan Kupang. "Setidaknya mereka punya tambahan penghasilan. Yang penting mereka bangga pada hasil kerja sendiri," kata Yeskiel.

Dari hasil kerja keras itu, PKBM Galatya kini tidak hanya mengajarkan baca tulis, tetapi juga membuka kelas pemberantasan buta huruf, kursus Universitas Terbuka (UT) daring, serta menyediakan akses wifi gratis bagi pelajar desa.

Bagi warga Kualin, Aipda Yeskiel bukan hanya polisi, tetapi juga guru, sahabat, dan penggerak kehidupan. Setiap pagi ia melaksanakan tugas kepolisian, menyambangi warga dan menjaga kamtibmas, lalu sore harinya kembali mengajar di PKBM. "Kalau anak-anak di sini bisa sekolah dan punya cita-cita, itu sudah cukup bagi saya," katanya dengan senyum tenang.

Bagi Yeskiel, menjadi polisi bukan sekadar menegakkan hukum, tetapi menegakkan martabat manusia. "Kalau masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tugas polisi akan jauh lebih mudah," ujarnya.

Dedikasi Aipda Yeskiel Hadjo menjadi bukti bahwa pengabdian seorang Bhayangkara tidak berhenti pada menjaga keamanan, tetapi juga menumbuhkan harapan dan kemandirian di tengah masyarakat. Dari pelosok Kualin, ia menyalakan cahaya kecil yang kini menerangi banyak kehidupan, menghadirkan wajah Polri yang humanis, berdaya, dan penuh kepedulian. [\*]

# Ditilang atau Diceramahin,

## Aksi Unik Bripda Ananda Rafi

*Menjadi polisi bukan sekadar menegakkan aturan, tapi juga menghadirkan wajah humanis Polri di tengah masyarakat dari jalanan hingga jagat maya.*

Suasana lalu lintas siang itu tampak normal, sampai seorang pengendara tiba-tiba nyelonong melawan arah. Bripda Ananda Rafi, anggota muda Korlantas Polri, segera menghentikan laju kendaraan tersebut. Dengan tenang namun tegas, ia menegur si pelanggar. "Mas-mas sek, kenapa lawan arus? Biar cepat, tapi bahaya..." tegurnya.

Alih-alih langsung menindak dengan surat tilang, Bripda Rafi memberi dua pilihan yang tak biasa: "Mau ditilang atau diceramahin?"

Sang pengendara, mungkin gugup sekaligus penasaran, memilih opsi kedua -diceramahi. Begitu opsi diambil, sontak Bripda Rafi melepas helm dinas, menyerahkannya kepada si pelanggar. "Pegang sek," katanya sembari mengambil kopiah yang memang sudah disiapkannya.

Seketika, suasana berubah gayeng. Pengendara motor yang melintas hingga ojek online yang mangkal tertawa lepas melihat adegan di depannya.

Tak berpanjang kata, Bripda Rafi meluncurkan ceramah singkat dengan gaya khasnya, ekspresif, penuh gestur, bahkan terkesan jenaka. Bukannya marah-marah, ia menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas dengan bahasa ringan yang mudah dicerna.





Begitu “ceramah” singkat itu tuntas, tangannya pun langsung diulurkan. “Yo wes, putar balik. Ati-ati,” katanya singkat—tanpa surat tilang.

Momen ini terekam kamera dan diunggah ke media sosial. Hanya dalam hitungan jam, videonya menyebar luas dan menuai beragam komentar. Banyak warganet menilai pendekatan ini lebih membekas dibanding tilang biasa. “Lebih ngena,” tulis salah satu pengguna Instagram,

sementara yang lain berkomentar, “Andai semua polisi kayak gini, orang pasti lebih disiplin.”

Aksi sederhana namun unik itu menjadikan Bripda Ananda Rafi buah bibir publik di jagat maya. Ia bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga menghadirkan wajah segar dan humanis Polri di mata masyarakat.

### Nilai Kebaikan

Bagi Rafi, menjadi polisi bukan sekadar menegakkan aturan, tapi juga tentang menghadirkan nilai kebaikan melalui cara yang menyenangkan. Dari jalanan hingga jagat maya, ia membuktikan bahwa disiplin dan edukasi bisa disampaikan dengan pendekatan yang ringan dan menghibur.

Namun, di balik sosoknya yang jenaka dan percaya diri, tersimpan perjalanan panjang penuh ketekunan. Sebelum mengenakan seragam cokelat, ia pernah berjualan ikan cupang untuk membantu keuangan keluarga. Ia menjalani usaha kecil itu dengan tekun, berkeliling ke sekolah-sekolah dan pasar. Ketekunan tersebut menjadi fondasi kuat ketika ia berjuang mendaftar sebagai anggota Polri.



## B UAH BIBIR

Tak sekali ia mengalami kegagalan, namun setiap penolakan dijadikannya motivasi untuk memperbaiki diri hingga akhirnya impiannya terwujud: diterima sebagai anggota polisi dan bertugas di Korlantas Polri.

Bertugas di Subdit Tatib Ditgakkum Korlantas, Rafi dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosialisasi keselamatan berkendara. Ia memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyampaikan pesan positif dan edukatif, mengajak masyarakat tertib lalu lintas dengan cara yang mudah dipahami. Pendekatannya yang komunikatif membuatnya disukai publik, terutama kalangan muda.

Selain aktif di lapangan, Rafi juga memiliki segudang prestasi. Ia pernah menjadi Juara 1 Pencak Silat Nasional Bandung Lautan Api Championship tahun 2021, mewakili kontingen Korlantas Polri dan meraih medali emas dalam ajang tanding antarinstansi. Tahun berikutnya, ia dinobatkan sebagai Cendekia Lulusan Polisi Terbaik se-Indonesia pada Dikbangspes Dikmas Lantas (Pendidikan Masyarakat) di Pusdik Lantas Serpong tahun 2022.

Dalam tugas operasional, Rafi juga pernah dipercaya menjadi motoris Patwal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat tergabung dalam Satgas Operasi Mantab Brata Capres-Cawapres 2023-2024. Kini, ia tengah menempuh beasiswa S1 Hukum Islam di STAIINDO Jakarta Klender melalui jalur prestasi, sembari terus menjalankan pengabdian sebagai anggota Polri.

Di luar dinas, Rafi masih memelihara hobinya, merawat ikan cupang sebagai simbol perjalanan hidupnya. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti membantu korban banjir dan ikut dalam kampanye kemanusiaan.

Bagi Bripda Ananda Rafi, menjadi polisi bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga tentang membangun hubungan baik dengan masyarakat. Dari jalan raya hingga ruang digital, dari panggung edukasi hingga arena prestasi, ia menunjukkan bahwa pengabdian bisa lahir dari ketulusan dan kreativitas dua hal yang selalu ia bawa sejak masa mudanya. [\*]





# **LEWAT 'JUMAT PEDULI', POLRI AJAK OJOL JAGA IBU KOTA**

**DIVISI HUMAS POLRI**



# INOVASI DIVHUMAS

Biro Penmas Polri  
Majalah Tribrata News  
Tersedia Online



[www.humas.polri.go.id](http://www.humas.polri.go.id)